BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dapat diartikan kelestarian yang menyangkut aspek fisik, sosial dan politik dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam (resources management) yang mencakup hutan, tanah dan air, pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta pembangunan sumber daya manusia (human resoueces development). Salah satu kegiatan pembangunan berkelanjutan adalah sektor pariwisata, sebab dari sektor pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan sekaligus mendatangkan devisa yang mendukung pencapaian pendapatan asli daerah (PAD).

Persoalan yang urgen untuk diselesaikan dalam pembangunan kepariwisataan itu adalah bagaimana mengaitkan aktifitas ekonomi masyarakat yang masih dominan dalam sektor pertanian dalam arti luas, dengan kegiatan kepariwisataan yang dapat menambah daya tarik bagi wisatawan yang datang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat. Aktifitas pertanian masyarakat Minangkabau yang kental dengan budaya agraris dan dijalin dengan nuansa keagamaan Islam, telah membawa daya tarik sendiri bagi kunjungan wisatawan.

Adapun praktek pertanian masyarakat Minangkabau secara tradisional maupun modern, tentunya akan menjadi paket kunjungan wisatawan yang menarik. Sampai saat ini belum ada destinasi wisata yang menawarkan konsep agrowisata di wilayah Sumatera Barat yang *representative* mewakili kultur dan nilai-nilai masyarakat agraris yang kental dengan budaya Minangkabau dan kekhasan hasil bumi lokal Sumatera Barat baik dalam bentuk tanaman pangan,

hortikultura, tanaman endemik, tanaman farmasi, dan kegiatan pertanian lainnya dalam arti luas yang memberikan simbol terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Minangkabau dengan tatanan sistem matrilinealnya yang unik.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan satu destinasi agrowisata yang *representative* di Sumatera Barat untuk direncanakan dengan baik sehingga dapat mewakili keinginan untuk membangun kepariwisataan Sumatera Barat yang menarik bagi wisatawan yang datang berkunjung. Kawasan agrowisata yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kota Padang.

Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya. Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Disamping itu yang termasuk dalam agrowisata adalah perhutanan dan sumber daya pertanian. Perpaduan antara keindahan alam, kehidupan masyarakat pedesaan dan potensi pertanian, bilamana ditata secara baik dan ditangani secara serius dapat mengembangkan daya tarik wisata.

Bagaimana potensi kawasan Lubuk Minturun ini dalam agrowisata di Sumatera Barat, bagaimana tata guna lahannya, kondisi agroekologinya, *landscape*, kondisi tata ruangnya, model pengembangan agro wisatanya, bagaimana pengelolaan obyek daya tarik agrowisatanya, bagaimana zona

pengembangan agrowisatanya, bagaimana fasilitas agrowisata Lubuk Minturun ini dikembangkan, dan bagaimana pola kemitraannya dengan masyarakat setempat, semuanya itu adalah persoalan yang penting untuk diselesaikan dalam pembangunan kawasan agrowisata Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang ini. Adapun tujuan dari kegiatan pengembangan kawasan agrowisata Lubuk Minturun pada tahun 2015 yaitu sebagai wilayah destinasi utama Pariwisata Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kawasan Wisata pendidikan pertanian berbasis agro di Sumatera Barat
2. Merevitalisasi kawasan agrowisata Lubuk Minturun
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan
4. Menyediakan layanan konsultasi agribisnis.

Dalam hal ini perkembangan sektor pariwisata pun telah berkembang pesat seiring dengan perubahan pola pikir, bentuk dan sifat-sifat dari kegiatannya sendiri. Perkembangan ini pun menuntut agar industri pariwisata untuk lebih atraktif dan inovatif dalam mengemas suatu paket wisata, tentunya perkembangan ini melibatkan banyak pihak sehingga dapat tercapai pengelolaannya agar mampu bersaing dengan pariwisata lainnya. Untuk itu, berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang pembentukan satuan tugas penyiapan kawasan agrowisata Balai benih Induk Lubuk Minturun tahun 2015. Dalam Penyiapan Pembangunan Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun perlu adanya Koordinasi dengan pihak SKPD terkait, yang mana Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus, dalam koordinasi antara lain harus adanya integrasi

dan sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah yang sama dalam mencapai satu tujuan.

Untuk itu peneliti dalam penelitian tentang Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, mengangkat penelitian ini dan melihat proses pelaksanaan koordinasi antara satgas yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang pembentukan satuan tugas penyiapan kawasan agrowisata Balai Benih Induk Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun tahun 2015, yang akan peneliti turunkan berdasarkan teori Koordinasi dari Malayu P.Hasibuan yang dikutip dari Sandy Risdyandy, yang menjelaskan tentang Koordinasi, Untuk melihat bagaimana koordinasi Satuan Tugas (Satgas) dalam penyiapan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, Yang mana akan Peneliti bahas dalam temuan peneliti berdasarkan variabel-variabel dan diturunkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

5.1. Koordinasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang

Dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, guna menunjang kawasan agrowisata tersebut sudah difasilitasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku *Leading Sektor* dan dipertanggung jawabkan kepada SKPD maupun Instansi yang tergabung di dalam Satuan Tugas (Satgas) penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang.

Dimana dalam hal ini berdasarkan karakteristiknya yang mendasarkan seluruh operasi pada pertanian dan lahannya, maka pengembangan agrowisata selalu menuntut pengembangan seluruh sub-sistem pertanian secara terintegrasi. Seluruh sub-sistem agrowisata terikat dalam kesatuan kawasan, sehingga untuk mengembangkan agrowisata, pengembangan kawasan mutlak diperlukan. Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan agrowisata diperlukan koordinasi lintas sektoral, yang mana sebagai tujuan untuk pelaksanaan pengembangan kawasan Agrowisata di Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, dalam Pelaksanaannya diperlukan Koordinasi dari pihak atau instansi terkait.

Koordinasi menempati peran penting dalam sebuah organisasi. Pentingnya koordinasi dalam organisasi adalah agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan dapat menyingkronkan keseluruhan tujuan dan kepentingan bersama. UPTD BBI TPPH sebagai salah satu UPTD dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, sebagai pengelola kawasan Agrowisata BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Melakukan upaya untuk menyelaraskan tujuan dari perencanaan mereka bersama.

Koordinasi sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Koordinasi merupakan bagian terpenting dari sebuah proses pelaksanaan kegiatan hal ini sebagai upaya dalam pengembangan kawasan agrowisata BBI TPPH di Lubuk Minturun. Untuk melihat koordinasi pada Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata BBI TPPH ini, peneliti menggunakan konsep yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan yang dirujuk dari jurnal Sandy Risdyandy yang mana menjelaskan tiga Variabel, yang terdiri dari kesatuan tindakan, komunikasi,dan pembagian kerja. Dimana dalam

hal ini variabel-variabel dan diturunkan melalui Indikator yang akan peneliti jelaskan adalah suatu bentuk tingkatan untuk mencapai keberhasilan dari Koordinasi antara Satgas yang tergabung dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun, sebagaimana yang telah dijelaskan, maka yang dimaksudkan untuk keberhasilan dalam mengukur keberhasilan koordinasi yaitu sebagai berikut:

5.1.1 Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep Kesatuan Tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Konsep kesatuan tindakan menurut Hasibuan dalam Sandy Risdyandy[60] adalah pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini merupakan untuk memperoleh suatu keberhasilan koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal dan waktu yang dimaksudkan bahwa kesatuan tindakan itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun wawancara peneliti dengan Bapak Ir. Harmen Selaku Kabid. Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat:

[60]Sandy Risdyandy., loc.cit.

> "...Pada Tahun 2013 kami mendengar memang ada rencana pembangunan kawasan agrowisata, tapi setahu kami itu hanya wacana saja, tapi pada tahun 2014 Dinas kami ikut berpartisipasi. Kebanyakan dari anggota satgas tidak turun lapangan langsung, hanya saja nama mereka dimasukan supaya proses pembangunan ini berjalan, seperti pencairan anggaran dan makannya nama-nama Kepala Dinas yang menjabat itulah yang dimasukan ke daftar anggota..."(wawancara dengan Bapak Ir. Harmen selaku Kabid. Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pada 19 September 2018 pukul 10.12 Wib)

Pernyataan dari Bapak Ir. Harmen menyatakan bahwasanya daftar-daftar anggota Satgas tersebut hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Anggota Satgas kepada Gubernur, yang mana kebanyakan dari nama-nama anggota Satgas tidak mengetahui namanya tertera didalam daftar anggota Satgas, seperti yang disampaikan oleh bapak Ir. Zaidir selaku Subag. Perencanaan dan Evaluasi BKP Sumatera Barat:

> "...Emangnya iya ada kegiatan seperti ini ya? Kok saya tidak tahu, waktu itu sih emang ada rencana kegiatan seperti ini tapi setelah itu sudah tidak ada kabarnya lagi, dan saya juga tidak ambil pusing mungkin dibagian bidang lain..." (Wawancara dengan Subag. Perencanaan dan Evaluasi BKP Prov. Sumbar Hari Jumat tanggal 21 September pukul 10.32-11.40 WIB)

Dari pernyataan Bapak Ir. Zaidir tersebut disampaikan oleh Bapak Ir. Djoni selaku Kadis. DPTP tahun 2015 sekaligus pencetus ide pembangunan kawasan agrowisata tersebut:

> "...Untuk semua Dinas yang terkait kami sudah memberikan informasi tentang rencana pembangunan ini, ya mungkin saja mereka tidak mau ambil pusing. Tapi untuk kegiatan ini sudah kami persiapkan sebaik-baiknya..." (Wawancara dengan Bapak Ir. Djoni selaku mantan Kadis. DPTP Hari Rabu tanggal 19 September 2018 pukul 11.40- 12.35 WIB)

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat SKPD yang tergabung didalam anggota Satgas tersebut juga

sebagian tidak mengetahui nama mereka masuk kedalam anggota Satgas, tapi menurut Bapak Ir. Djoni daftar anggota Satgas yang dikeluarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat tersebut memang kebanyakan nama mereka dibuat agar memudahkan prosesnya pembangunan, karena pembangunan tersebut membutuhkan banyaknya anggaran. Adapun pembangunan ini dalam perencanaannya akan dilaksanakan seperti pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat Lubuk Minturun

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH, Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat bagaimana perencanaan awal dari Pembangunan Infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, yang mana dalam perencanaannya pembangunan tersebut sebagai penunjang kawasan agrowisata di Lubuk minturun, tujuan dari pembangunan tersebut sebagai upaya aktivitas agrowisata yang diharapkan dapat menarik para wisatawan untuk menikmati berbagai jenis hasil pertanian dan sekaligus memberikan dorongan kepada pengenalan berbagai jenis hasil lainnya seperti perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hortikultura. Adapun Koordinasi yang terintegrasi yang

dilaksanakan antar Satgas tersebut sesuai dengan perencanaan menurut Malayu P, Hasibuan yaitu sebagai berikut;

5.1.1.1 Mengatur Jadwal dan Waktu

Mengatur jadwal dan waktu menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan kesatuan tindakan. Dengan mengatur jadwal dan waktu kegiatan organisasi, maka tujuan organisasi akan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Dimana dalam Koordinasi, pengaturan jadwal dan waktu kegiatan harus ditentukan dalam setiap perumusan kebijakan, hal ini supaya koordinasi antar pelaksana dapat berjalan baik dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera barat di Lubuk Minturun Kota Padang dimana mengatur jadwal dan waktu merupakan suatu hal yang penting agar tercapainya kesatuan tindakan bagi seluruh instansi yang terlibat dalam satuan tugas dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat ini.

Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan satuan tugas yang terdiri dari sepuluh SKPD maupun Instansi. Untuk itu, dalam Koordinasinya untuk mengatur jadwal dan waktu merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan agar instansi-instansi tersebut dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal mengatur jadwal dan waktu kegiatan ini, satgas penyiapan kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan diskusi maupun rapat bersama, guna menyiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata yang pada saat itu diketuai oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan yang pada saat itu masih menjabat yaitu Bapak Ir. Djoni.

Dalam indikator Pengaturan jadwal dan waktu, hal ini disetujui dan disepakati bersama pada pertemuan awal, yang dilaksanakan pada acara Hari Pangan Nasional bulan November tahun 2013. Adapun pada awal perencanaannya yang menghadiri rapat di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun hanya ada lima dinas pada tahun 2013, yang mana pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1:

Tabel 5.1
Anggota Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur UPTD BBI TPPH Tahun 2013

No	Nama	Jabatan dan Dinas
1	Ir. Djoni	Kadis. Pertanian Provinsi Sumatera Barat
2	Ir. Fajarudin	Kadis. Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
3	Ir. Yosmeri	Kadis. Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
4	Drh. Erinaldi, MM	Kadis. Peternakan Provinsi Sumatera Barat
5	Ir. Effendi, MP	Kadis. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2013.

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat pada awal perencanaannya tahun 2013 hanya ada lima dinas yang menghadiri pertemuan dan pada tahun 2014 Dinas-dinas yang tergabung Anggota Satgas juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyiapan bangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Dalam hal ini demi mewujudkan pembangunan yang berorientasi kepada infrastruktur kawasan agrowisata maka perlu adanya koordinasi dari SKPD yang membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dimana instansi terkait memiliki Penanggung Jawab yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggung jawab dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat Lubuk Minturun Kota Padang.

Untuk itu dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, maka dikeluarkanlah

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk Lubuk Minturun Tahun 2015, yang mana menetapkan hal-hal sebagai berikut :[61]

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk (BBI) Lubuk Minturun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
2. Satuan Tugas mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Menyiapkan dan menyelesaikan kebutuhan kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun sebagai destinasi wisata agro, baik infrastruktur maupun substansi agrowisata.
   b. Menyusun langkah-langkah persiapan soft launching kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun pada bulan Maret 2015 dan Grand Opening pada bulan Januari 2016.
   c. Menyusun langkah-langkah promosi dan upaya mendatangkan kunjungan ke kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun baik setelah soft launching maupun grand opening.
   d. Menyiapkan konsep pengelolaan kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun baik setelah soft launching maupun grand opening.
3. Satuan Tugas Penyiapan Kawasan Agrowisata BBI Lubuk Minturun, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.
4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan rincian yang telah dijelaskan, demi tercapainya tujuan pembangunan kawasan agrowisata, maka satuan tugas yang telah dibentuk diperlukan keterlibatan antar SKPD untuk berkoordinasi demi mencapai tujuan satu sama lain. Karena pada dasarnya koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), menyingkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif

[61] Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk Lubuk Minturun Tahun 2015.

dan efisien.[62] Dimana dengan adanya koordinasi diharapkan setiap satuan tugas yang terlibat menjalin kerjasama dan komunikasi yang memudahkan pertukaran informasi dalam hubungan timbal balik terjadi secara baik.

Adapun Koordinasi yang dilakukan antar Satgas dalam pembangunan tersebut sesuai dengan yang tertera pada rincian keputusan Gubernur tersebut, satgas melaksanakan pembangunan tersebut secara koordinatif. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk *Soft Opening* dan *Grand Opening* pada tahun 2015. Yang mana laporan kegiatan pembangunan tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan didalam Pembangunannya segala bentuk biaya dikeluarkan melalui anggaran APBN, APBD maupun berbentuk Tender kepada pihak ketiga.

Pada awal perencanaannya pada tahun 2013 hanya ada lima Dinas yang menghadiri rapat yaitu Ir.Djoni dari Kadis. Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, yang mana Bapak Ir.Djoni merupakan pencetus ide dari pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat dan juga sebagai Ketua Pengarah, berdasarkan temuan peneliti dilapangan segala bentuk proses yang terjadi dilapangan dari perencanaan sampai dengan proses pembangunannya Kadis. DPTP yang menjabat pada tahun 2015 inilah yang mengusahakan proses pembangunan tersebut, dan juga dibantu oleh Kadis Perkebunan Provinsi Sumatera Barat , Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis. Peternakan dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Yang mana tugas dan fungsi dari Kadis-kadis tersebut sebagai penanggung jawab

[62] Usman Husaini.2011. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara hlm. 439

dan yang merencanakan kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang pada tahun 2013. Selain itu pada tahun 2014 sudah ada beberapa Dinas yang ikut bergabung dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang adapun Dinas tersebut tergabung dalam anggota Satuan Tugas (Satgas).

Yang mana masing-masing Dinas memiliki Penanggung Jawab yaitu Ir. Andi Ikhvan, ME. Selaku Kabid.Irigasi dan Rawa PSDA Provinsi Sumbar, yang bertugas pada sektor pengairan dan irigasi, sedangkan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini yaitu Drs. Didit P. Santoso selaku Kabid. Pemasaran yang bertugas pada pengembangan sektor wisata, sedangkan dari Badan Ketahan Pangan yang menjadi perpanjangan tangan dari Kepala BKP yaitu Ir. Zaidir, yang bertugas pada sektor pelaksana unit teknis pangan, selain itu anggota Satgas lainnya yaitu Dudi Badrudin, S.Hut selaku Kasi. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Dinas Kehutanan yang bertugas pada sektor lahan pada pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun, sedangkan dari BAPPEDA ang bertanggung jawab dalam pembangunan ini yaitu ibuk Gusti Rufita, MP selaku Kasubid Ekonomi BAPPEDA yang berperan sebagai Perencanaan Pembangunan, sedangkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Guswardi, S.PT, M.Si yang bertanggung jawab pada sektor budidaya ikan. Dan anggota satgas lainnya yang bertanggung jawab dari Dinas Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat yaitu Ir. Nur Fitrisman, MM selaku Kabid Kominfo yang bertugas pada sektor komunikasi dan informasi, dan

anggota satgas lainnya berasal dari Dinas Prasjaltarkim yaitu Ir Fatriaman Nur selaku Kabid Perumahan dan dalam pembangunan infrastruktur tersebut bertugas pada Sektor Jalan Lingkungan dan Infrastruktur Pembangunan.

Koordinasi antar satgas ini antara lain ikut membantu dan meringankan pekerjaan di lapangan dalam bentuk persetujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Berawal dari saling kompaknya kadis-kadis ini dalam hubungan pertemanan, sehingga dalam berkoordinasi mereka hanya mengandalkan komunikasi dua arah dan melakukan pertemuan. Dari sinilah nantinya pelaksanaan pembangunan ini mulai dilakukan oleh Ir. Djoni sebagai Kadis. Pertanian Tanaman Pangan tahun 2015 merangkul bersama-sama rekan dari SKPD yang terkait dalam pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang.

Dalam hal ini peran dari masing-masing aktor dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, bahwasanya setiap aktor ataupun anggota Satgas yang telah dibentuk melalui SK Gubernur Sumatera Barat yang peneliti temui dilapangan, setiapa anggota Satgas telah diberi wewenang dan tanggung jawab hal ini terlihat pada pernyataan peneliti diatas, yang mana daftar anggota Satgas dan Kedudukan satgas telah ditentukan baik dari Kepala Dinas maupun perpanjangan kepala Dinas.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan anggota satgas banyak yang tidak mengetahui bahwa namanya dicantumkan kedalam SK Gubernur, hal ini dikarenakan SK Gubernur Sumatera Barat tentang penyiapan pembangunan

infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang diterbitkan pada tahun 2015. Karena pada proses pembangunannya Koordinasi yang dilakukan hanya ada beberapa anggota Satgas yang mana dalam hal ini perencanaan pembangunan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan soft launching dan grand opening pada tahun 2015. Melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015, maka muncul Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. Jadi, Dalam pembangunannya pada tahun 2016 setelah Kepala Dinas yang menjabat pada tahun 2015 yaitu Bapak Ir. Djoni, adapun Peraturan ini terdapat ketentuan bahwa fungsi UPTD BBI Lubuk Minturun dibawah naungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan agrowisata yang tertuang dalam ketentuan pasal 17 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman pangan[63].

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, maka selaku Dinas yang bertanggung jawab atas UPTD BBI Lubuk Minturun dikeluarkanlah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera barat Nomor : 521.1/6784 Diperta-2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura (UPTD BBI TPPH) Provinsi Sumatera Barat, demi kelancaran tugas tersebut.

[63] Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi Sumatera Barat pasal 17

Sebagaimana dimaksud dalam uraian tugas tersebut bertambahnya tugas pokok dan fungsi UPTD BBI TPPH sebagai berikut :[64] Jadi, berdasarkan temuan peneliti dilapangan anggota satgas yang terdapat dalam SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan pada tahun 2015 hanya berlaku pada masa Bapak Ir. Djoni karena secara keseluruhan dari proses pembangunan hanya Kepala Dinas DPTP tersebut yang mengusahakan kegiatan. Dan tujuan dari pembuatan SK Satgas tersebut hanya untuk mempermudah proses administrasi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat Lubuk Minturun Kota Padang.

Adapun Tugas Pokok UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang benih induk tanaman padi palawija, hortikultura dan agrowisata. Fungsi dari UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat yaitu menyusunan rencana pengembangan teknis operasional benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pengkajian dan analisis teknis operasional benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pengujian dan persiapan teknologi benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pelaksanaan kebijakan teknis operasional benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pelaksanaan operasional tugas teknis DPTP sesuai dengan bidang benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura;

[64] Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 521.1/6784 Diperta-2015 tentang Uraian Tugas dan fungsi UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat

pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan agrowisata; dan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini, maka segala bentuk pengelolaan dan pelaksanaan kawasan agrowisata berdasar uraian tugas pokok dan fungsi diserahkan kepada UPTD BBI TPPH dibawah naungan Dinas Pertanian Tanaman pangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan agrowisata tersebut sudah difasilitasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan dipertanggung jawabkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi yang tergabung di dalamnya.

Berdasarkan Kesepakatan, jadwal dan Waktu disusun dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi bersama pada pertemuan selanjutnya yang berlokasi di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Hal ini diungkapkan oleh mantan kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dulu menjabat ketika pembangunan ini dilakukan, Bapak Ir. Djoni dalam kutipan wawancara berikut ini:

> "... kegiatan ini kami buatkan target waktu yang di bahas pada awal pertemuan di BBI TPPH Lubuk Minturun. Jadwal dan waktu kegiatan inilah yang disepakati bersama sehingga pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam pembangunan menjalankan kegiatannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati..." (Wawancara dengan Bapak Ir. Djoni pada Hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 pukul 10.31-11.00 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa satgas mengatur jadwal dan waktu kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata dilakukan pada saat pertemuan yang dilakukan di areal kawasan UPTD BBI TPPH. Dalam pertemuan tersebut, instansi yang terlibat menyepakati

kegiatan yang akan dilakukan dan mengatur jadwal dan waktu tiap-tiap bagian SKPD agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Dudi Badrudin, S.Hut seperti kutipan wawancara berikut ini:

> "... Dalam pembangunan infrastruktur kawasan agro kami dari Dinas Kehutanan melaksanakan pembuatan rumah jamur, sarang lebah dan arboretum. Pelaksanaannya kami mulai di tahun 2014 dan alhamdulillah sesuai dengan waktu dan jadwal kegiatan yang ditentukan. Kalau masalah sukses tidaknya yang kami fasilitasi, pada tahun 2015 rumah jamur sudah menghasilkan dan beberapa lebah madu juga. Kalau untuk jadwal dan waktu kegiatan dinas kehutanan sudah melakukan pembangunan yang dibutuhkan..." (Wawancara dengan Bapak Dudi Badrudin, S.Hut pada Hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 pukul 10.31- 11.00 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam sebuah rapat dan diskusi pertemuan, masing-masing instansi yang terlibat membahas program dan kegiatan yang akan mereka lakukan. Selain itu, untuk merencanakan program atau kegiatan ini instansi atau satgas ini mempunyai target waktu yang telah mereka tetapkan untuk menyelesaikannya diwaktu yang disepakati sesuai dengan keahlian mereka. Pernyataan Bapak Dudi tersebut juga didukung dengan pernyataan yang diutarakan oleh Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan UPTD BBI, Ibuk Rini Historina dalam kutipan wawancara berikut ini :

> "...awal kegiatan perencanaan ini memiliki target waktu. Pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Perencanaan pembangunan ini kami targetkan dalam 1 tahun untuk beberapa dinas, sehingga diharapkan pembangunan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan jadwal waktu yang disepakati." (Wawancara dengan oleh Kasi

Pengembangan dan Pemeliharaan UPTD BBI pada Hari kamis tanggal 3 Mei 2018 pukul 10.00- 11.50 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan dibutuhkan pengaturan jadwal dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Hal ini diperlukan agar dalam pelaksanaan tidak terjadi tumpang tindih antar SKPD terkait. Adapun perencanaan dari SKPD terkait dalam pelaksanaan jadwal waktu pembangunan dapat dilihat melalui Tabel 5.2 :

Tabel 5.2

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

NO	Tahun	Kegiatan	Dinas	Keterangan
1	Sept-Nov 2014	Gudang Alsintan	DPTP	Tersedia
2	-	Gudang Pupuk	DPTP	Belum ada
3	Sept-Nov 2015	Outlet Penjualan Sayur	BKP	Tersedia
4	Agust-Sept 2016	Pedestrian di Lokasi KRPL	BKP	Tersedia
5	Sept- Nov 2016	Instalasi Untuk Perawatan bangunan	BKP	Tersedia
6	Juli-Sept 2016	Outlet cafe hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Tersedia
7	Sept-Nov 2014	Rehabilitasi Kolam Bertingkat	DKP	Tersedia
8	-	Rehabilitasi Kolam Aquaponik	DKP	Belum ada
9	Juli-Agust 2017	Rehabilitasi Kolam Therapy	DKP	Tersedia
10	-	Rehabilitasi Kolam Hias	DKP	Belum ada
11	Agust- Okt 2015	Rehabilitasi Kolam Pancing	DKP	Tersedia
12	-	Rehabilitasi Kolam Pacu Belut	DKP	Belum ada
13	-	Rehabilitasi Kolam Pembenihan	DKP	Belum ada

14	Jan- Feb 2015	Kios Penjulan Pelet	DKP	Tersedia
15	-	Kolam Air Bersih	DKP	Belum ada
16	Juni- Juli 2015	Kafe Hasil Olahan Peternakan	Dinas Peternakan	Tersedia
17	Juni-Juli 2016	Gazebo	Dinas Peternakan	Tersedia
18	Juni-Juli 2016	Gudang Pakan Ternak	Dinas Peternakan	Tersedia
19	Juni-Juli 2016	Ruang Pengolahan Pupuk	Dinas Peternakan	Tersedia
20	Agust- Okt 2016	Toko Penjualan Pupuk	Dinas Peternakan	Tersedia
21	Agust-Okt 2016	Jaringan Air Bersih	Dinas Peternakan	Tersedia
22	-	Jalan Lingkar Sepeda Motor	Dinas Kehutanan	Belum ada
23	Juni-Juli 2016	Jalan Setapak	Dinas Kehutanan	Tersedia
24	Juni-Juli 2015	Instalasi untuk Kran air Taman	Dinas Kehutanan	Tersedia
25	Juni-Juli 2014	Kios Penjualan jamur dan madu	Dinas Kehutanan	Tersedia
26	Agust- Okt 2016	Bak Penampungan Air	Dinas Kehutanan	Tersedia
27	-	Menara Pantau	Dinas Prasjaltarkim	Belum ada
28	Juni-Juli 2016	Lampu Penerangan Jalan	Dinas Prasjaltarkim	Tersedia
29	Juni-Juli 2014	Lampu Hias Kawasan	Dinas Prasjaltarkim	Tersedia
30	-	Restoran	Dinas Prasjaltarkim	Belum ada
31	Sept-Nov 2014	Perencanaan Jalan	Dinas Prasjaltarkim	Tersedia
32	Sept-Nov 2016	Lapangan Parkir	Dinas Prasjaltarkim	Tersedia
33	-	Tugu dan Pelataran, Instalasi Lampu Taman dan Tempat duduk	Dinas Prasjaltarkim	Belum ada

34	Sept-Nov 2014	Perencanaan Irigasi dalam kawasan	Dinas PSDA	Tersedia

Sumber: UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat.

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bersama-sama itu semata-mata karena banyak proyek yang sekali jalan ditenderkan kepada kontraktor sehingga berjalan sekaligus, akan tetapi walaupun begitu tetap saja proyek pembangunan tersebut dijalankan oleh masing-masing dinas terkait, begitupun terhadap fasilitas yang belum dibangun juga masih banyak.

Berdasarkan tabel tersebut dan berdasarkan temuan peneliti yang mana pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang dilakasanakan anggota Satuan Tugas (Satgas) yang tergabung dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang dan berdasarkan SKPD dari masing-masing Satgas dimana dalam hal ini pembangunan yang dilakukan pada tahun 2015 masih sedikit yang terbangun, hasil dari penelitian ini dapat dibuktikan pada tabel 5.2 yang mana pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, banyak dilakukan pada tahun 2016, karena pada tahun 2015 masing-masing Satgas dari SKPD terkait, membangun Infrastruktur kawasan agrowisata untuk mengejar *Soft Launching* dan pembangunan tersebut banyak yang di tenderkan.

Adapun Kesimpulan rapat pada tahun 2016, dapat dilihat pada rincian pembahasan berikut ini;

1. Infrastruktur penunjang Agrowisata di kawasan Lubuk Minturun yang dibangun mulai tahun 2014 sampai saat ini belum lengkap dan perlu disempurnakan.

2. Sarana dan Prasarana yang sudah ada sebagian ada yang rusak dan ada yang tidak termanfaatkan.
3. Satgas penyiapan agrowisata yang dibentuk pada tahun 2015 sudah tidak relevan lagi karena banyak dari anggota yang sudah purna tugas dan berpindah tugas.
4. Seluruh sarana dan prasarana yang dibangun oleh masing-masing SKPD, Pemeliharaannya menjadi tanggung jawab SKPD bersangkutan karena penyerahan aset tersebut belum ada kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
5. Untuk Pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah dibangun akan ditingkatkan dengan cara mengadakan iven-iven wisata, terutama wisata edukatif yang melibatkan anak sekolah.

Berdasarkan rincian Kesimpulan rapat pada tahun 2016 dan dari beberapa paparan wawancara yang telah peneliti jelaskan diatas, berdasarkan variabel kesatuan tindakan dan diturunkan melalui indikator pengaturan jadwal dan waktu, yang mana peneliti menilai koordinasi dari pihak terkait sudah cukup efektif dan baik hal ini terlihat bagaimana implementor memahami perencanaan pembangunan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya.

Dalam Pelaksanaan penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang pembentukan satuan tugas (Satgas), yang mana satgas yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur tersebut hanya sebagai penanggung jawab di lapangan, dan setelah itu masing-masing satgas menyerahkan hasil keputusan tersebut kepada SKPD atau instansinya masing-masing. Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari Satgas tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Satuan Tugas mempunyai tugas yaitu menyiapkan dan menyelesaikan kebutuhan kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun sebagai destinasi wisata agro, baik infrastruktur

maupun substansi agrowisata, menyusun langkah-langkah persiapan soft launching kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun pada bulan Maret 2015 dan Grand Opening pada bulan Januari 2016, menyusun langkah-langkah promosi dan upaya mendatangkan kunjungan ke kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun baik setelah soft launching maupun grand opening, menyiapkan konsep pengelolaan kawasan agrowisata BBI Lumin baik setelah soft launching maupun grand opening.

Adapun Koordinasi yang dilakukan antara pihak SKPD yang tergabung dalam Satgas tersebut yaitu dengan adanya rapat, melalui hasil dan keputusan rapat tersebut SKPD yang tergabung dalam satgas yaitu membuat atau merumuskan perencanaan untuk menunjang kawasan agrowisata, sebagaimana yang telah tertera dalam Surat Keputusan Gubernur berdasarkan Tupoksi dari Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk.

Dalam penelitian ini Hasibuan berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu adanya Kesatuan tindakan, Yang dimaksud sebagai kesatuan tindakan menurut Hasibuan adalah kesatuan dari pada usaha, berarti pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.[65] Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan agar kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

[65] *Ibid.*

Mengatur jadwal dan waktu sangat diperlukan dalam kesatuan tindakan, sehingga tidak ada pekerjaan yang sia-sia dan waktu yang terbuang. Semakin cepat dikerjakan maka akan semakin baik. Dengan mengatur jadwal dan waktu oleh setiap anggota satgas yaitu melakukan rangkaian rapat anggota satgas, merumuskan pelaksanaan pembangunan, dan membagi tugas antar satgas dalam melaksanakan tugas masing-masing sehingga kegiatan dalam organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Koordinasi ini dilakukan oleh kadis Dinas Pertanian Tanaman Pangan selaku pihak leading sektor dengan rekan-anggota satgas pada tiap-tiap SKPD yang terlibat, peneliti melihat bagaimana koordinasi yang terjalin antar anggota satgas sehingga terdapat keserasian dalam mengatur jadwal dan waktu di setiap kegiatan pembangunan. Pada penelitian ini, peneliti melihat dalam indikator pengaturan jadwal dan waktu dalam koordinasi penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang sudah cukup efektif hal ini terlihat dari data-data, dokumentasi maupun paparan wawancara peneliti dengan pihak informan. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut peneliti melihat koordinasi yang terjadi antar satgas dalam penyiapan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik, yang mana Koordinasi yang dilakukan antar satgas sudah mencapai tujuannya pada tahun 2015, hal ini terlihat pada pembangunan yang sudah selesai maupun dalam tahap penyelesaian.

5.1.1.2 Keserasian dalam Mencapai Hasil.

Salah satu indikator keberhasilan untuk mencapai kesatuan tindakan adalah keserasian dalam mencapai hasil. Untuk memperoleh sebuah koordinasi, maka dalam sebuah organisasi diperlukan keserasian masing-masing unit yang terpisah agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Satuan Tugas dalam penyiapan infrastruktur kawasan agrowisata yang terdiri dari berbagai lintas sektoral tentu sangat membutuhkan keserasian dan kerjasama dalam mencapai tujuan yaitu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun. Instansi-instansi yang terlibat dalam Satgas ini perlu secara bersama-sama melakukan pembangunan agar tujuan dalam penyiapan dibentuknya Satgas ini dapat tercapai dengan baik.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur UPTD BBI TPPH dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam pertanian yang terdapat pada pengembangan agrowisata. Konsep dasar pengembangan kawasan yaitu menciptakan kawasan agrowisata berbasis pendidikan dan penerapan teknologi pertanian, untuk meningkatkan apresiasi terhadap bidang pertanian dan menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan pertanian. Dalam prakteknya diharapkan kawasan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan penemuan teknologi-teknologi baru di bidang pertanian kepada masyarakat luas dan kalangan petani. Selain itu dengan meningkatnya aktivitas agrowisata di kawasan Lubuk Minturun diharapkan akan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun Pengembangan pengelolaan agrowisata di perkotaan memerlukan kerjasama yang erat antar berbagai sektor, yaitu sektor

perhubungan, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pembangunan daerah dan sebagainya.

Pada dasarnya hubungan antara peminta jasa agrowisata dan penyedia agrowisata memerlukan kerjasama yang erat, yang mampu mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Upaya mewujudkan agrowisata di perkotaan menjadi khas, karena pendapat masyarakat tentang pertanian selalu dihubungkan dengan suasana pedesaan. Dalam pengembangan agro ini perlu perumusan yang seksama, yang sesuai dengan wajah dan karakter perkotaan. Dengan demikian karakter pertanian yang dicari adalah pertanian perkotaan. Oleh karena itu sejak awal proses perwujudan agrowisata perkotaan sampai pengelolaan di lapangan memerlukan kerjasama yang erat dan terpadu antar sektor-sektor tersebut. Adapun dalam penelitian ini keserasian dalm mencapai hasil yang dilaksanakan antar satgas dalam penyiapan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, Koordinasi yang terjadi adalah berawal dari pertemuan tahun 2014, yang mana anggota satgas merencanakan perencanaan pembangunnannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, adapun hasil pertemuan tahun 2014 tersebut dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Berdasarkan pertemuan pada tahun 2014, adapun perencanaannya sebagai berikut;

a. Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan

   Beberapa fasilitas yang dibangun antara lain, menanam tanaman buah-buahan, membuat kebun aneka sayur dan buah semusim, merehab gedung

alsintan, membangun labor kultur jaringan, membangun toilet menjadi gazebo serta membuat sebagian pagar kebun agrowisata.

b. Dinas perkebunan

   Menanam tanaman kopi, coklat, mengadakan outlet penjualan hasil perkebunan.

c. Dinas Peternakan

   Mengadakan sapi perah dan rumputnya, membangun instalasi biogas, mengadakan peralatan pembuat Es cream susu sapi.

d. Dinas Perikanan

   Mengadakan aquarium dan berbagai jenis ikan hias, pengadaan beberapa jenis ikan air tawar.

e. Badan Ketahanan Pangan

   Memfasilitasi sarana dan prasarana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta beberapa jenis tanaman untuk perumahan dalam lokasi kawasan agrowisata Lubuk Minturun.

f. Dinas Kehutanan

   Pengadaan rumah jamur dan budidaya jamur tiram, peternakan lebah madu, dan membuat kawasan Arboretum

g. Dinas Prasjaltarkim

   Membuat DED dan maket kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun, membangun jalan lingkar agrowisata BBI, membuat kolam ikan dan air mancur, serta membuat lampu penerangan lokasi Agrowisata BBI Lubuk Minturun.

h. Dinas PSDA

   Membangun dan memperbaiki saluran irigasi, membuat kolam bertingkat.

Sebagaimana hasil pertemuan pada tahun 2014 tersebut, seluruh aktor pelaksana yang bertugas sebagai Satgas dari tiap masing-masing SKPD telah memiliki perencanaan masing-masing, pelaksanaan pembangunan tersebut sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH, adapun Koordinasi yang dilakukan oleh seluruh satgas dimulai dengan adanya pertemuan pada tahun

2014 dan dilanjutkan pada pertemuan tahun 2015, pada tahun 2015 seluruh SKPD yang tergabung dalam pembentukan satgas, mengadakan pertemuan kembali dan merencanakan penyiapan pembangunan, selain itu beberapa SKPD juga ikut berpatisipasi, hal ini dapat dilihat pada hasil pertemuan tahun 2015.

Pada tahun tahun 2015 beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang sudah dilengkapi adalah:

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

   a. Fasilitasi Dana APBD

      Melengkapi tanaman landscape kawasan agrowisata, merehab kantor menjadi gazebo, membuat dua unit gazebo, melengkapi kolam bertingkat dengan dengan lampu hias, membuat kolam, fasilitasi sarana produksi kebun aneka sayur dan buah semusim, rehab rumah dinas, melanjutkan pembangunan pagar kebun agrowisata serta pemeliharaan tanaman koleksi agrowisata.

   b. Fasilitasi Dana APBN

      Membuat Vertikal Garden, Melengkapi landscape kawasan agrowisata, pembuatan pergola untuk agrowisata, pembuatan dua unit screen house untuk sayuran, satu unit tanaman anggrek, dua sprinkler untu pengairan, outlet tanaman hias dan rehab bangunan labor kultur jaringan jadi outlet hasil olahan berbagai jenis produk tanaman pangan dan hortikultura.

Gambar 5.2

Laboratorium Kultur Jaringan dan Screen House

Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2018 .

Berdasarkan Gambar 5.2 dapat dilihat sarana dan prasarana yang telah selesai dan dimanfaatkan dalam kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Adapun Infrastruktur tersebut dimanfaatkan sebagai penunjang kawasan agrowisata.

2. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Adapun dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat telah membangun infrastruktur Rumah Perawatan Tanaman Perkebunan Agrowisata dalam kawasan Lubuk Minturun yang dapat dilihat pada Gambar 5.3 :

Gambar 5.3

Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 5.3 dapat dilihat infrastruktur yang telah dibangun oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, yang mana infrastruktur tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat perawatan atau penanaman benih Tanaman coklat dan Kopi.

3. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat

Tugas dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat yaitu Membuat pagar kebun rumput dan kandang sapi, dan Rehab gudang menjadi outlet hasil produk peternakan. Adapun pembangunan infrastruktur yang telah selesai dan dimanfaatkan dapat dilihat pada Gambar 5.4:

Gambar 5.4

Kandang Sapi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 5.4 dapat dilihat sarana dan prasarana yang telah selesai dibuat oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, meskipun pemanfaatan infrastruktur tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan, tapi dalam perencanaannya Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Adapun sarana dan prasarana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan Pemeliharaan Ikan air tawar dan membuat aquarium ikan laut.

Gambar 5.5

Kolam Ikan Air Tawar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 5.5 dapat dilihat infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terlihat kolam ikan air tawar yang telah dibuat dan dimanfaatkan, hal ini sebagai penunjang infrasruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat.

5. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Adapun dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai penunjang kawasan agrowisata, Dinas Kehutanan sendiri melaksanakan Pemeliharaan Kawasan Arboretum, Jamur Tiram, dan ternak lebah madu. Berikut Gambar rumah jamur;

Gambar 5.6

Rumah Jamur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 5.6 dari hasil perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sendiri telah membangun Rumah jamur Pada Kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat. Rumah jamur sendiri dimanfaatkan sebagai tempat budidaya jamur tiram.

6. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat sendiri dalam menunjang kawasan agrowisata yaitu melaksanakan Pemeliharan tanaman Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Gambar 5.7

Tanaman Pada Kawasan Rumah Pangan Lestari

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 5.7 merupakan salah satu infrastruktur yang telah terealisasi yang dibangun oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, adapun tujuan dari pembangunan tersebut sebagai bentuk upaya untuk memperindah tatanan dalam kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang.

7. Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat

Dari perencanaannya sendiri Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang kawasan agrowisata yaitu Membangun Lapangan Parkir, Gedung pusat informasi, membuat DED dan maket Agrowisata BBI. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.8 :

Gambar 5.8

Replika Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 5.8 dapat dilihat pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat, yang mana Dinas Prasjaltarkim sendiri telah membuat Lapangan Parkir dan membuat replika

kawasan Agrowisata di Gedung pusat informasi UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat.

8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat

Adapun pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat sendiri dalam menunjang kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat yaitu Melanjutkan saluran irigasi yang masih tertinggal.

Gambar 5.9

Sarana dan prasarana Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

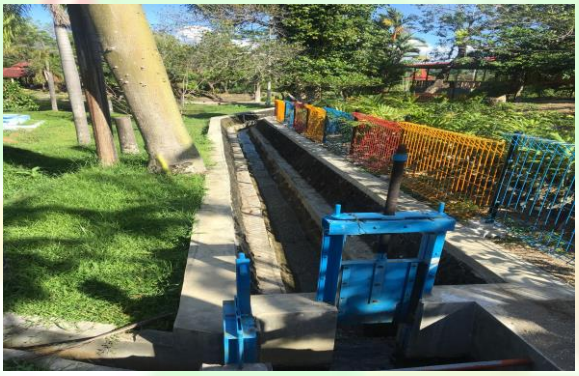

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 5.9 dapat dilihat pelaksanaan tugas dari Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat yaitu melanjutkan rehabilitasi pada saluran irigasi di kawasan agrowisata UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat yang masih tertinggal.

9. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Untuk menunjang kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sendiri dalam tugasnya yaitu Membuat Baliho kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, melatih masyarakat, melatih pelajar SMK Pertanian sebagai

pemandu Agrowisata BBI Provinsi Sumatera Barat. Adapun hasil tersebut dikemukakan oleh Bapak Drs. Didit P. Santoso selaku anggota Satgas dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;

> "...Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sendiri dalam menunjang pembangunan infrastruktur melakukan edukasi kepada Siswa SMK dimana mereka diarahkan untuk menjadi pemandu wisata sehingga mereka mengerti tentang Agrowisata..."(wawancara dengan Kasi.pengembangan Pariwisata Prov.Sumbar Pada Hari Senin 4 Juni 2018 Pukul 10.34- 11.25 WIB)

Adapun pernyataan dari Bapak Didit tersebut juga di sampaikan oleh Ibuk Asistasia, S.S Selaku Kasi Pengembangan Objek dan Atraksi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;

> "...Dulu waktu ada pembukaan Soft Launching kami menyiapkan Baliho, tujuannya untuk mempromosikan kepada masyarakat..." (wawancara dengan Kasi Pengembangan Objek dan Atraksi Dinas Pariwisata Prov. Sumbar Pada Hari Senin 11 Juni 2018 pukul 09.45-10.10 Wib).

Berdasarkan dari paparan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Satgas juga mempersiapkan tugasnya guna untuk menunjang pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata. Hal ini juga dibuktikan oleh Ibuk Yulia Defi, S.Pd Selaku Guru dari SMK PP N Padang;

> "...memang benar pada tahun 2015 ada sosialisasi untuk murid-murid waktu itu mereka belajar tentang pertanian sekaligus menjadi pemandu wisata, lalu mereka diajarkan langsung dari Dinas Pariwisata, kalau sekarang dari pihak sekolah aja lagi... (wawancara dengan Guru SMK PP N Padang Pada hari Rabu 8 Agustus 2018 Pukul 09.10-10.00 WIB).

Berdasarkan dari Kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya Dinas Priwisata Provinsi Sumatera Barat, melakukan kegiatan tersebut untuk

mewujudkan pelaksanaan dari kegiatan tersebut, yang mana pihak SMK PP N Padang sendiri juga mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan dari kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaannya yaitu membuat Baliho atau papan reklame informasi, hal ini bertujuan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada pihak terkait maupun kepada masyarakat luas yang mana kegiatan tersebut dilakukan pada kegiatan *Soft Launching* dan *Grand Opening* pada tahun 2015.

10. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat dalam tugasnya yaitu Memfasilitasi Jaringan Wifi di Kawasan Agrowisata BBI Lubuk Minturun. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.10 :

Gambar 5.10

Sarana dan Prasaran Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 5.10 dapat dilihat Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi jaringan Wifi untuk Kawasan Agrowisata di UPTD BBI

TPPH Provinsi Sumatera Barat tersebut, yaitu sebagai penunjang kawasan tersebut sebagai kawasan wisata. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Ir. Nurfitrisman, MM selaku Kabid. Kominfo Provinsi Sumatera Barat;

> "... waktu itu, Kadis DPTP Bapak Ir. Djoni meminta untuk diberikan fasilitas wifi pada kawasan agrowisata yang sedang berlangsung, jadi dari kami hanya fasilitas wifi itupun sudah dari tahun 2015..." (wawancara dengan Kabid. Kominfo Provinsi Sumatera Barat pada 23 september 2018 pukul 10.12-11.00 WIB).

Berdasarkan data dokumentasi yang telah peneliti paparkan dari pertemuan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tersebut dapat dilihat perencanaan dan penyelesaian pembangunan dari masing-masing SKPD terkait yang tergabung dalam pembentukan satgas penyiapan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD BBI TTPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun kota Padang ini muncul karena potensi pertumbuhan sektor pariwisata yang selalu meningkat setiap harinya, di lain hal instrumen pertanian juga mendominasi akan kebutuhan didalam masyarakatnya sehingga munculah gagasan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata.

Banyaknya pemangku kepentingan yang dilibatkan untuk saling berkoordinasi yang bertujuan agar tujuan pembangunan ini dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan konsep perencanaan mengharuskan adanya koordinasi yang baik dari sejak awal perencanaan sampai tahap penyelesaian. Untuk itu, dalam Koordinasi antar satgas sangatlah dibutuhkan keserasian dari masing-masing pihak yang terlibat dalam Satgas penyiapan kawasan agrowisata UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera barat di Lubuk Minturun Kota Padang ini.

Yang mana tujuan dari koordinasi yang dilaksanakan adalah untuk mencapai hasil bersama, karena dalam pembangunan ini tujuan yang diharapkan dalam koordinasi tersebut adalah untuk menunjang pembangunan dan masing-masing SKPD terkait dapat menyelesaian tugas dan tanggung jawabnya. Adapun Beberapa fasilitas yang belum terealisasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.3

Fasilitas Yang Belum Terealisasi

NO	Dinas	Sarana dan Prasarana
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat	Pembangunan Rumah sarana Produksi
2	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Membangun Outlet untuk hasil olahan tanaman perkebunan
3	Dinas Peternakan	Pembangunan outlet untuk hasil olahan peternakan
4	Dinas Perikanan	Rehabilitasi Kolam (enam Kolam)
5	Dinas Prasjaltarkim	Pembangunan menara pandan dan restorasi, dan penyelesaian jalan lingkar.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dilihat, bahwasanya dalam pembangunan Infrastruktur di Kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa fasilitas yang telah direncanakan tapi belum terealisasi, hal ini dikarenakan adanya kendala yang terjadi seperti terbenturnya dana dan berdasarkan hasil temuan di lapangan yang ditemukan oleh peneliti, peneliti melihat yang terjadi adalah masing-masing instansi yang merupakan Satuan

Tugas (Satgas) penyiapan kawasan agrowisata masih berjalan secara sendiri-sendiri bahkan ada yang tidak dikoordinasi langsung oleh leading sektor sehingga belum terdapat keserasian di dalam anggota satgas untuk mencapai hasil terkait pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Guswardi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan yang diberi wewenang dalam mengurus kawasan agrowisata dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan seperti kutipan wawancara berikut ini :

> "... selama ini saya rasa belum terlalu maksimal ya, karena itu tadi koordinasi ini kurang terpantau. Maksudnya kami sebagai pemberi fasilitas menjalankan apa yang sudah ada saja, sebenarnya ketika mereka meminta pasokan ikan dan pembuatan kolam ya kami lakukan. Kalau mereka tidak minta ya kami tidak melakukan apa-apa. Kalau bicara koordinasi kan sama-sama melakukan pekerjaan, tapi yang sekarang terjadi tidak begitu. Setiap instansi hanya melakukan pekerjaannya saja, kami tidak tahu menahu bagaimana satgas lain melakukan bagiannya. Yang kami tahu bagian kami saja..."(wawancara dengan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 13.45-14.20 Wib).

Dari kutipan wawancara dengan Bapak Guswadi, dapat kita lihat bahwa keserasian anggota satgas dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD belum terjadi keselarasan pada masing-masing anggota satgas untuk saling bekerjasama dan saling menyingkronkan tugas mereka dalam pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata ini. Hal ini juga disampaikan oleh Ibuk Ir. Gusti Rufita, MP selaku kasubid ekonomi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diberi mandat ikut andil dalam perumusan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata, menyebutkan bahwa koordinasi yang terjalin itu hanya antara

Satgas dan leading sektor masing-masing berdasarkan kebijakan dan aturan di tiap-tiap instansi. Seperti kutipan wawancara berikut:

> "... kami selaku badan perencanaan pembangunan daerah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada satgas yang sesuai dengan perencanaan diawal, tugas kami hanya mewadahi apa yang diinginkan dinas terkait. Tapi dari apa yang kami lihat memang keserasian antar satgas itu tidak terlalu baik, karena yang penting bagi mereka tupoksi masing-masing. Selesai atau tidak pelaksanaan pembangunan itu kami juga tidak tahu dan tidak ada kelanjutannya harus diapakan."(wawancara dengan kasubid ekonomi Bappeda Sumbar pada hari senin tanggal 16 April 2018 pukul 10.00-10.55 Wib).

Dari wawancara dengan Ibu Gusti Rufita diatas dapat kita lihat bahwa masing-masing anggota Satgas ini belum mencapai keserasian masing-masing anggotanya sehingga pembangunan ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. Pernyataan bahwa kesatuan tindakan belum berjalan maksimal secara keseluruhan juga disampaikan oleh Bapak Didit P. Santoso dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat selaku salah satu anggota Satgas sebagai berikut :

> "...sebenarnya pengelolaannya belum baik, regulasi kebijakannya tidak ada. Kami dari Dinas Pariwisata bukan berarti menjadi pengelola sekaligus, kami melakukan apa yang bisa kami berikan seperti memberikan edukasi kepada anak SMK, membuatkan berita acara dan baliho. Kalau untuk berkoordinasi dengan Dinas lain kami tidak ada karena mereka juga mengurusi bagiannya masing-masing. Begitu saja..."(wawancara dengan Kabid pengembangan dan pemasaran Dinas Pariwisata Prov Sumbar pada rabu 16 mei 2018 pukul 12.10-12-55 Wib).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sejauh ini masing-masing instansi yang terlibat di Satuan Tugas Penyiapan Kawasan Agrowisata dalam pembangunan infrastrukturnya belum terkoordinasi dengan

baik dan melakukannya secara sendiri-sendiri. Dapat dilihat juga bahwa koordinasi terjadi antara satu dinas dengan leading sektornya saja, akan tetapi tidak maksimal karena masih adanya kekurangan dana pada beberapa dinas sehingga perencanaan yang mereka sepakati tidak berjalan dengan lancar. Hal itu juga tidak ditindak lanjuti sehingga pembangunan ini terhambat. Belum selesainya pembangunan ini oleh beberapa dinas juga dikarenakan proyek yang tidak dikontrol dengan baik. Infrastruktur yang masih belum terbangun juga dibenarkan oleh Bapak Daslir selaku Kabag. TU di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat Lubuk Minturun. Berikut kutipan wawancaranya :

> "... kami yang ada di UPTD ini bersifat menerima dan melihat kinerja pembangunan yang dilakukan oleh satgas sesuai dengan keahlian bidangnya, kalau masalah masih banyak bangunan yang belum selesai kami juga tidak tahu kenapa tidak diselesaikan. Kami juga menunggu bagaimana kelanjutannya dari Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan."(wawancara dengan Ka.TU UPTD BBI pada senin 16 juli 2018 pukul 13.00-14.00 Wib).

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh beberapa informan tersebut, Bapak Ir. Djoni mengungkapkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan sudah dilakukan secara bersama dan sudah berjalan dengan baik. Seperti kutipan wawancara berikut ini :

> "... saya selaku kepala dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang menjabat waktu itu merasa sudah menjalankan apa yang harus dilakukan, terbukti pembangunan berjalan. Memang masih banyak yang belum terealisasi tapi kalau masalah bidang infrastruktur ini ada kok satgas nya itu dari dinas PU dan PSDA mereka bersama-sama melakukannya ." (Wawancara dengan kadis DPTP tahun 2015 pada 18 Juli 2018 pukul 14.20-14.55 Wib).

Dari kutipan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa tidak semua instansi yang terlibat dalam Satgas melakukan pembangunannya sendiri-sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Djoni selaku kepala dinas yang kala itu menjabat mengatakan bahwa satgas ini juga terbagi kedalam bidang-bidang untuk mengurusi kedudukannya di dalam satgas secara bersama sebagai contoh dinas PSDA bersama dinas Pekerjaan Umum memegang bidang infrastruktur dalam pembangunan sektor jalan lingkungan dan infrastruktur pembangunan sektor pengairan dan irigasi. Pernyataan Bapak Ir. Djoni tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Andy Ikhvan, ME sebagai salah satu satgas Kabid Irigasi dan Rawa Dinas PSDA yang tugasnya memegang bidang infrastruktur, seperti kutipan wawancara berikut ini :

> "...pada waktu itu saya memang memegang sektor pengairan dan irigasi disandingkan dengan Ir. Fatriaman Nur dari dinas Prasjaltarkim. Itu saja tapi bukan berarti kami melakukan bersama-sama..." (wawancara dengan kabid Irigasi dan Rawa Dinas PSDA Sumbar pada kamis 17 mei 2018 pukul 11.00-11.40 wib).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD BBI TPPH Provinsi Lubuk Minturun Kota Padang belum semua anggota satgas yang aktif. Kurangnya kesadaran akan pentingnya koordinasi antar instansi maupun leading sektor kepada satgas yang memiliki keahlian tiap bidangnya dalam pembangunan ini sehingga hanya beberapa dinas saja yang menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perencanaan awal, jika pelaksanaan pembangunan ini dilaksanakan bersama-sama akan mendapatkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi peneliti yang terlihat pada Gambar 5.11 :

Gambar 5.11

Kolam Aquaponik Yang Terbengkalai

Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 5.11 dapat dilihat bagaimana infrastruktur yang telah dibuat masih belum terealisasikan dengan baik, hal ini karena ketidaksiapan dari Satgas dalam hal perencanaan, yang mana Salah satu indikator keberhasilan untuk mencapai kesatuan tindakan adalah keserasian dalam mencapai hasil. Untuk memperoleh sebuah koordinasi, maka dalam sebuah organisasi diperlukan keserasian masing-masing unit yang terpisah agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Satgas penyiapan kawasan agrowisata sebagai salah satu lembaga lintas sektoral yang di dalamnya terdapat beberapa instansi/dinas tentu dibutuhkan kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Instansi-instansi yang terlibat di dalam Satgas perlu secara bersama-sama melakukan kegiatan pembangunan agar tujuan awal dibangunannya kawasan agrowisata ini dapat tercapai dengan baik.

Dalam penelitian ini salah satu indikator dalam keberhasilan mencapai Koordinasi yang baik juga melihat keserasian dalam mencapai hasil. Untuk memperoleh sebuah koordinasi, maka dalam sebuah organisasi diperlukan

keserasian masing-masing unit yang terpisah agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pada penelitian ini, peneliti melihat apakah sejauh ini instansi-instansi dan SKPD yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun belum mencapai keserasian dalam menjalankan tugasnya sehingga koordinasi tersebut kurang efektif dimana dalam hal ini berdasarkan data dokumentasi maupun paparan wawancara yang telah peneliti jelaskan memang masih belum maksimal. Koordinasi antar satgas ini terjadi karena dalam pembangunan tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri dimana setiap anggota satgas hanya memprioritaskan urusannya masing-masing, ini dikarenakan karena pada saat melakukan rapat tidak semua anggota satgas yang hadir bahkan hanya beberapa SKPD saja yang terlihat melakukan rapat anggota satgas dengan leading sektor. Selain karena faktor alasan masing-masing dinas, peneliti melihat bahwa ada beberapa anggota satgas yang bahkan tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan pembangunan di kawasan agrowisata ini karena banyak dari satgas ini menyerahkan proses pembangunan yang menjadi kewajibannya dilakukan oleh leading sektor dan UPTD BBI TPPH. Oleh karena itulah, keserasian dalam mencapai hasil tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan penjabaran yang telah peneliti paparkan, peneliti melihat bagaimana kesatuan tindakan yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam pembangunan infrastruktur agrowisata yang dilihat dari kewajibannya dalam melaksanakan koordinasi, pengaturan jadwal dan waktu kegiatan dalam melaksanakan koordinasi, serta keserasian dalam mencapai hasil dalam menjalankan tugas terkait pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata BBI

TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang dapat dikatakan sudah cukup efektif.

Hal ini terlihat dari indikator pengaturan jadwal dan waktu, yang mana SKPD terkait sudah mempunyai target waktu yang telah ditetapkan, dan dilihat dari Indikator Keserasian mencapai hasil meskipun terkesan berjalan masing-masing dalam pembangunannya juga tidak memiliki kendala-kendala yang berarti karena tujuan dari rencana awal pembangunan tersebut dapat dijalankan berdasarkan tanggung jawab dari masing-masing Dinas dalam menunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

5.1.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.[66]

[66] Sandy Risdyandy.

Konsep komunikasi menurut Hasibuan seperti yang ditulis oleh Sandy Risdyandy[67] adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap atau prilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut. Sejalan dengan yang diutarakan oleh Hasibuan sebagaimana yang ditulis oleh Sandy Risdyandy, Sondang P. Siagian juga mengemukakan bahwa dalam suatu organisasi menyelenggarakan komunikasi secara terus menerus merupakan suatu keharusan. Dikatakan demikian karena melalui komunikasi berbagai hal yang menyangkut kehidupan organisasi disampaikan oleh satu pihak ke pihak yang lain.

Satgas merupakan instansi-instansi lintas sektoral yang tergabung didalamnya yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata ini, komunikasi menjadi sangat penting bagi penentu keberhasilan program yang disusun. Sebaliknya, tanpa adanya komunikasi unsur-unsur yang terdapat didalam satgas tidak dapat saling berinteraksi dan bekerjasama sehingga tujuan dibentuknya satgas tidak dapat tercapai dengan baik. Maka untuk membina hubungan kerja antar anggota satgas ini baik antara atasan maupun bawahan diperlukan komunikasi sehingga setiap kegiatan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menjelaskan komunikasi di dalam satgas, maka peneliti mengadopsi konsep yang dipaparkan oleh Sondang P. Siagian dan ditambahkan oleh James F.

---

[67] Ibid.

Stoner, dimana terdapat beberapa arus komunikasi dalam suatu organisasi diantaranya :[68]

5.1.2.1 Komunikator

komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respons dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima, dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator bisa disebut juga pengirim atau pemrakarsa terjadinya proses komunikasi, pengirim juga merupakan sumber informasi.[69]

Dalam Koordinasi, Komunikasi antar Satgas dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat sangat dibutuhkan, yang mana bentuk komunikasi ini maksudnya adalah penyampaian informasi yang dilakukan oleh leading sektor sebagai pemrakarsa pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata kepada anggota Satgas lainnya. Pada Satuan tugas (Satgas) ini sendiri bentuk komunikasi sebagai pengirim adalah penyampaian informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan kepada dinas-dinas atau instansi yang tergabung dalam anggota Satgas.

[68] Stoner, James F.1986 , Mangement, Prentive-Hall Int' : New Jersey

[69] Dr. Siwi Ultima Kadarmo. 2001. Koordinasi dan Hubungan Kerja. LAN RI hal 37

Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata ini pihak dinas yang ikut andil di dalamnya dapat menerima informasi berupa kebijakan, instruksi dan lain-lain dari leading sektor atau yang disebut atasan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai berikut:

> "...terkait pembangunan ini, berdasarkan SK Gubernur memang Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang memiliki wewenang itu artinya saya selaku kepala dinas lah yang bertanggung jawab, dibantu oleh dinas-dinas lain bersama-sama melakukan pembangunan. Akan tetapi, untuk pengelolaan sebenarnya langsung kepada UPTD BBI TPPH itu sendiri, karena mereka UPTD tidak mungkin langsung berkomunikasi kepada dinasnya, makanya saya yang melakukannya, kalau untuk berkomunikasi saya juga menyertakan wakil ketua dari dinas pariwisata karena kawasan ini berbasis pariwisata pasti yang dari dinas pariwisata lah yang lebih mengerti..." (wawancara dengan kadis DPTP tahun 2015 hari senin 21 Mei 2018 pukul 14.00-14.35 wib).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa, leading sektor sebagai koordinator melakukan komunikasi dengan dinas-dinas yang terdapat di dalam satuan tugas secara langsung salah satunya dengan wakil ketua dari dinas pariwisata. Pernyataan kepala dinas tersebut juga didukung dengan pernyataan wakil ketua satgas itu sendiri, yaitu Bapak Didit P. Santoso yang mengungkapkan bahwa :

> "... sejauh ini selama tahun 2013 sampai tahun 2015 komunikasi dari kepala dinas pertanian tanaman pangan selalu terjadi, itu sebabnya pembangunan pada tahun itu berjalan baik. Saya sendiri sering berkomunikasi dengan beliau. Kalau komunikasi secara keseluruhan memang hanya sesekali. Karena pada dasarnya instansi terkait sudah tahu apa yang mereka harus lakukan." (wawancara dengan kabid

> pengembangan dan pemasaran dinas pariwisata pada kamis 18 juli 2018 pukul 10.25-11.25 wib).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat kita lihat bahwa komunikasi terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang adalah antara pemrakarsa yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan dinas-dinas lain berikut juga dengan wakil ketua karena memang sesuai dengan keahliannya dari dinas pariwisata.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Kepala BBI TPPH Lubuk Minturun Ibuk Ir. Elviana Anwar, Msi berikut ;

> "...Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan merupakan koordinator yang memiliki wewenang dalam mengkoordinasikan seluruh instansi-instansi yang terkait dalam satuan tugas pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata ini, yang kemudian secara teknis memiliki anggota dengan kedudukan masing-masing di dalam satgas..." (wawancara dengan Ka. UPTD BBI pada 6 juli 2018 pukul 12.00-13.00 wib).

Berdasarkan paparan wawancara diatas peneliti melihat, bagaimana Koordinasi antar SKPD terkait dalam penyampaian informasi dari Komunikator cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya rapat, Rapat menjadi salah satu sarana sebagai pertukaran informasi bagi satuan tugas pada instansi terkait. Informasi yang diperoleh dalam rapat maupun pertemuan berupa pengarahan, instruksi, perintah, kebijaksanaan baru, dan pedoman kerja. Dimana dalam hal ini leading sektor mengambil bagian terbanyak dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata karena Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan bagian dari UPTD BBI TPPH yang ada di Lubuk Minturun. Karena atas dasar inilah komunikator dipegang oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respons dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima, dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator bisa disebut juga pengirim atau pemrakarsa terjadinya proses komunikasi, pengirim juga merupakan sumber informasi.[70]

Pada penelitian ini, peneliti melihat komunikasi yang terjalin antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai induk dari leading sektor dengan anggota satgas lainnya di UPTD BBI TPPH dalam membangun infrastruktur kawasan agrowisata BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang cukup efektif hal ini terlihat dengan adanya rapat dalam perencanaan karena rapat merupakan suatu alasan sebagai sarana pertukaran informasi yang baik dalam mencapai suatu keberhasilan dalam Koordinasi. Selain itu, faktor keberhasilan koordinasi juga dilihat dari bagaimana komunikasi dua arah yang dilakukan leading sektor dengan anggota satgas yang lain sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti melihat dari paparan wawancara, data dan dokumentasi pihak komunikan yaitu leading sektor sudah menjalankan kewajibannya dengan baik terlihat dari banyaknya infrastruktur yang sudah selesai dan dapat dimanfaatkan, ini

[70] Dr. Siwi Ultima Kadarmo. 2001. Koordinasi dan Hubungan Kerja. LAN RI hal 37

menunjukkan adanya interaksi antar leading sektor dan anggota satgas dalam mewujudkan kawasan agrowisata yang representatif.

5.1.2.2 Komunikan

Komunikan adalah pihak penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi, pihak yang menerima dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pengirim. Penerima menerjemahkan pesan ke dalam bentuk yang mempunyai arti dan dapat dimengerti.[71] Penerima ini adalah pihak yang menerima pesan yang dilakukan oleh pengirim sehingga terdapat komunikasi diantara keduanya.

Bentuk komunikasi yang dikategorikan komunikan ini adalah sebagai penerima informasi yang diberikan komunikator (pengirim) yaitu dinas-dinas yang tergabung ke dalam satgas yang menerima informasi dari leading sektor atau ketua pengarah. Bentuk komunikasi penerima ini salah satunya menerima perintah, ajakan, kebijakan, instruksi dan lain-lain yang berasal dari leading sektor untuk dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata Lubuk Minturun Kota Padang pihak satgas yang terbagi atas dinas-dinas seperti dinas Peternakan, Perikanan, dan lainnya sebagai pihak yang menerima informasi dari atasan atau leading sektor.

Pihak komunikan atau penerima informasi ini sangatlah penting karena jika tidak ada pihak penerima maka tidak akan terjadi komunikasi antar dua orang/ kelompok untuk merencanakan atau melaksanakan suatu kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu dinas yang termasuk kedalam satgas penyiapan pelaksanaan pembangunan

[71] Dr. Siwi Ultima Kadarmo. 2001. Koordinasi dan Hubungan Kerja. LAN RI hal 37

infrastruktur kawasan agrowisata, Bapak Didit P. Santoso dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

> "... Suatu kawasan bisa dijadikan sebagai tempat wisata, harus bisa menghidupi dirinya sendiri tapi disini terkendala prosedural. Program ini tidak multi years, sehingga ketika ada pembiayaan maka dilakukan, jika tidak ya tidak dilakukan..." (wawancara dengan kabid pengembangan dan pemasaran dinas pariwisata pada 18 juni 2018 pukul 10.00-11.25 wib).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penyampaian informasi antara pihak yang berkepentingan harus jelas, dari pernyataan tersebut Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Guswardi;

> '...Dalam kegiatan pembangunan ini saya melihat, komitmen sudah tidak ada lagi, Semua SKPD yang terlibat sudah berjalan masing-masing..." (wawancara dengan kabid perikanan tangkap DKP prov Sumbar pada 20 juni 2018 pukul 10.25-10.55 wib).

Berdasarkan paparan wawancara diatas dapat kita lihat bagaimana pihak yang berkepentingan tidak menyikapi penyampaian informasi dengan baik, komitmen yang telah dibuat sebelumnya tidak berjalan sesuai dengan rencana awal, hal ini karena kurangnya kejelasan Komunikasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait. Dimana dalam perencanaan pembangunan sebelumnya para pihak yang sudah tergabung dalam Satgas yang telah dibentuk, dapat dikatakan kurang siap dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini disampaikan berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Elviana Anwar Kepala UPTD BBI TPPH;

> "...Pihak DPTP baru memiliki lahan pertanian yang bisa dijadikan objek wisata ternyata tidak siap mengelola untuk menjadikan sebagai kawasan wisata, mereka hanya sampai menyediakan lahan dan

> komoditi saja..” (wawancara dengan ka. UPTD BBI pada 6 juli 2018 pukul 12.00-13.00 wib).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat,bahwa dalam pelaksanaannya para pihak SKPD yang tergabung dalam Satgas tidak siap dalam menjalankan sebuah perencanaan, hal ini dikarenakan kurangnya kejelasan komunikasi yang disampaikan sehingga koordinasi yang terjalin tidak berjalan dengan baik, dari permasalahan ini terlihat bahwa koordinasi antar SKPD terkait yang tergabung dalam Satgas pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun tidak sepenuhnya siap dalam melaksanakan tugasnya.

Komunikan dalam Koordinasi merupakan pihak penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi, pihak yang menerima dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pengirim. Penerima menerjemahkan pesan ke dalam bentuk yang mempunyai arti dan dapat dimengerti.[72] Penerima ini adalah pihak yang menerima pesan yang dilakukan oleh pengirim sehingga terdapat komunikasi diantara keduanya. Bentuk komunikasi yang dikategorikan komunikan ini adalah sebagai penerima informasi yang diberikan komunikator (pengirim) yaitu dinas-dinas yang tergabung ke dalam satgas yang menerima informasi dari leading sektor atau ketua pengarah.

Bentuk komunikasi penerima ini salah satunya menerima perintah, ajakan, kebijakan, instruksi dan lain-lain yang berasal dari leading sektor untuk dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti menurunkannya pada indikator komunikan yang mana dapat disimpulkan bahwasanya salah satu indikator

[72] Dr. Siwi Ultima Kadarmo. 2001. Koordinasi dan Hubungan Kerja. LAN RI hal 37

keberhasilan untuk mencapai Koordinasi yang baik adalah jelasnya Komunikasi. Dalam penelitian ini peneliti berdasarkan data dokumentasi maupun paparan wawancara yang telah peneliti jelaskan, peneliti melihat kurang efektifnya Komunikasi antara leading sector dengan anggota, hal ini dikarenakan kurangnya kejelasan komunikasi yang disampaikan sehingga koordinasi yang terjalin tidak berjalan dengan baik. Koordinasi ini tidak berjalan maksimal karena anggota satgas disini adalah kepala dinas yang masing-masing SKPD memiliki kewajiban-kewajiban lain, dilain hal jarangnya anggota satgas melakukan pertemuan seperti rapat dan turun langsung melihat kondisi lapangan sehingga terjadi kesalahan komunikasi atau informasi yang mengakibatkan terkendalanya proses pembangunan di kawasan agrowisata. Selain indikator Komunikan yang menentukan suatu keberhasilan koordinasi adalah baiknya informasi yang dilakukan.

5.1.2.3 Informasi

Salah satu indikator keberhasilan untuk mencapai Komunikasi adalah dengan adanya informasi yang baik, yang mana Informasi merupakan pesan berupa ide-ide, fakta, data, informasi atau permasalahan yang dimaksudkan oleh pengirim, atau dikomunikasikan kepada penerima. Secara umum informasi yang dijelaskan harus jelas, tegas, singkat dan lengkap. Dalam pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH tentunya informasi yang disampaikan harus baik dan dapat diterima dari semua pihak, agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ir. Joni;

> "...Dalam perencanaannya kita menginformasikan kepada pihak-pihak terkait, yang mana tujuan dari kegiatan ini sebagai bentuk pemancing masyarakat luar agar mengenali kawasan tersebut dan diharapkan dapat menjadikan ekonomi masyarakat berkembang..." (wawancara dengan kadis DPTP tahun 2015 pada 16 juni 2018 pukul 14.00-15.00 wib).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwasanya Koordinasi dapat berjalan baik apabila penyampaian informasi dilakukan dengan komunikasi yang baik, yang mana tujuan dari kegiatan tersebut harus jelas dan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaannya, hal senada juga disampaikan oleh Ibuk Asistasia, S.S dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumbar;

> "...Informasi yang kita terima dari pihak DPTP yaitu adanya kegiatan pembangunan kawasan agrowisata di Lubuk Minturun, pada waktu itu kita diminta untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, pada tahun 2015 kita memfasilatasi BBI untuk membuat Baliho dan paket-paket wisata.."(wawancara dengan ka biro dinas pariwisata pada 12 juni 2018 pukul 12.00-13.00 wib).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, yang mana informasi telah tersalurkan dengan baik, dari pemahaman anggota yang tergabung dalam satgas juga memahami tugas dan fungsinya dari kegiatan tersebut. Pernyataan dari Bapak Didit tersebut juga di dukung oleh pernyataan Ibu Rini Selaku Kepala seksi pengembangan dan pemeliharaan UPTD BBI TPPH;

> "...Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di BBI ini juga banyak SKPD yang terlibat, yang mana Pembangunan yang dilakukan yaitu sesuai dengan fungsi dari Dinas dan Kebutuhan dari BBI sendiri..." (wawancara dengan kasi pengembangan dan pemeliharaan UPTD BBI TPPH pada 4 juli 2018 pukul 09.20-10.20 wib).

Dari hasil paparan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana kegiatan pembangunan di BBI yaitu sesuai dengan fungsi dari SKPD dan sesuai dari kebutuhan kawasan BBI sendiri, dimana dalam kegiatannya pihak DPTP menyediakan lahan dan dikelola oleh pihak UPTD BBI TPPH. Dalam hal ini indikator Informasi dari variabel komunikasi dapat dikatakan cukup efektif, yang mana koordinasi dikatakan baik apabila Komunikasi antar implementor berjalan dengan baik. Berikut dokumentasi rapat yang pernah dilakukan di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang;

Gambar 5.12
Pertemuan Rapat Anggota Satgas Tahun 2014

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Tahun 2014

Berdasarkan Gambar 5.12 dapat dilihat ada beberapa Satgas yang sedang melakukan rapat dalam merumuskan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Terlihat beberapa Satgas membahas bagaimana langkah kedepannya dalam melaksanakan pembangunan ini. Adanya komunikasi yang dilakukan di awal-awal kegiatan sehingga pembangunan ini berjalan dengan baik.

Salah satu indikator keberhasilan untuk mencapai Komunikasi adalah dengan adanya informasi yang baik, yang mana Informasi merupakan pesan berupa ide-ide, fakta, data, informasi atau permasalahan yang dimaksudkan oleh pengirim, atau dikomunikasikan kepada penerima. Secara umum informasi yang dijelaskan harus jelas, tegas, singkat dan lengkap. Dalam penelitian ini berdasarkan variabel komunikasi dan diturunkan melalui indikator Informasi dapat disimpulkan bahwasanya informasi yang dilakukan oleh pihak DPTP sudah cukup efektif hal ini terlihat pada dokumentasi maupun paparan wawancara peneliti lakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Informasi ini terkait rencana pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata dimana tiap-tiap SKPD yang tergabung di dalam satgas memiliki peran masing-masing dalam ikut andil memberikan fasilitas yang menjadi keahlian mereka pada masing-masing dinasnya. Informasi yang berisi ide,ide gagasan inilah yang nantinya akan menjadi satu pada kawasan agrowisata yang sudah dimulai pembangunannya sejak 2014. Sehingga, menurut hemat peneliti informasi yang diterima oleh masing-masing SKPD dalam satgas sudah cukup efektif dan jelas bagi anggota satgas.

5.1.2.4 Saluran

Saluran adalah jalan yang dilalui suatu pesan dari pengirim kepada penerima, dalam indikator ini peneliti melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai leading sektor dalam Pembangunan Infrastruktur kawasan agrowisata di lubuk minturun, peneliti melihat bahwasanya dalam pelaksanaannya proses Komunikasi yang

dilakukan berjalan kebawah (downward) hal ini terlihat bagaimana pihak dari DPTP mengomunikasikan dan membuat sebuah kebijakan untuk merencanakan Pembangunan Infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ir. Djoni;

> "...pada tahun 2013 pihak DPTP mencanangkan tentang kebijakan yang akan dibuat yaitu tentang pembangunan kawasan agro yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan juga untuk mengedukasi anak sekolah, setelah itu para pihak yang tergabung dalam rapat menyetujui, dan situlah baru kami merencanakan pembangunan yang dibutuhkan..." (wawancara dengan kadis DPTP tahun 2015 pada 21 juni 2018 pukul 14.00-15.00 wib).

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut, dapat dijelaskan bagaimana proses komunikasi melalui indikator saluran, pihak dari DPTP memberi pancingan kepada SKPD yang hadir dalam acara kegiatan lalu menginformasikan, setelah itu semua pihak menyetujui kegiatan tersebut lalu dibentuklah satgas melalui Surat Keputusan Gubernur. Sebagaimana dimaksud hal ini pada dasarnya bertujuan untuk merencanakan pengembangan terhadap wisata yang berbasis agro, adapun di lubuk minturun karena kawasan ini pun mendukung dari kegiatan tersebut karena kondisi alam dan lingkungannya, hal ini juga diutarakan oleh Bapak Nanang Muldansyah Selaku Kasi. Produksi dan Usaha Pembudidayaan DKP Provinsi Sumatera Barat;

> "...Pada dasarnya kegiatan ini hanya wacana, kami waktu itu sedang menghadiri rapat tapi ternyata kegiatan ini menjadi serius ketika banyak SKPD yang tertarik dan berpartisipasi dari kegiatan ini..." (wawancara dengan kasi produksi dan Usaha Pembudidayaan DKP Prov Sumbar pada 24 juli 2018 pukul 13.10-14.00 wib).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dijelaskan bagaimana, perencanaan tersebut dilakukan ketika Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari banyaknya SKPD yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dari peryataan Bapak Nanang tersebut juga didukung pernyataan dari Ibu Rini;

> "...BBI ini sebagai pemancing masyarakat luar agar mengenali wisata yang berbasis agro, dari perencanaanya pun berawal dari pihak DPTP yang memberi informasi, dalam artian BBI ini milik DPTP, walaupun banyak pihak yang terlibat, tapi tujuan yang sebenarnya kan juga untuk keberhasilan daerah mereka sendiri..." (wawancara dengan kasi pengembangan dan pemeliharaan UPTD BBI pada 20 mei 2018 pukul 10.00-11.20 wib).

Berdasarkan beberapa paparan wawancara yang telah peneliti jelaskan pada dasarnya kegiatan pembangunan ini sebagai bentuk upaya dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Perkembangan wisata di Sumatera Barat, khususnya di Lubuk Minturun Kota Padang. Hal ini terlihat bagaimana pihak-pihak yang terkait mencoba untuk saling berkomunikasi dan menginformasikan agar tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, dalam indikator ini Koordinasi yang berjalan sudah cukup efektif yang mana saluran adalah jalan yang dilalui suatu pesan dari pengirim kepada penerima, dalam indikator ini peneliti melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai leading sektor dalam Pembangunan Infrastruktur kawasan agrowisata di lubuk minturun, peneliti melihat bahwasanya dalam pelaksanaannya proses Komunikasi yang dilakukan berjalan kebawah (downward) hal ini terlihat bagaimana pihak dari DPTP mengomunikasikan kepada Satgas dan membuat sebuah kebijakan untuk

merencanakan Pembangunan Infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat.

5.1.3 Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuanya, maka hendaknya dilakukan pembagian kerja. Menurut Hasibuan seperti yang dikutip dari Sandy Risdyandy[73], Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Dalam sebuah organisasi, dibutuhkan perincian tugas di masing-masing instansi yang terlibat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan tidak adanya peran ganda dalam organisasi tersebut. Begitu juga dengan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH, perincian tugas merupakan salah satu hal yang penting. Sebab, dengan adanya perincian tugas tersebut satgas tersebut mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, lebih spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan dari Pembangunan kawasan Agrowisata BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Untuk

[73] Loc.cit Sandy Risdyandy.

pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang dibutuhkan peranan masing-masing instansi yang terlibat dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Menurut Hasibuan seperti yang dikutip dari Sandy Risdyandy[74], Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Pembagian kerja diperlukan dalam Pembangunan Infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH di Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini tanpa adanya pembagian kerja mereka akan bekerja menurut kemauan sendiri-sendiri tanpa menghiraukan tujuan, yang berakibat tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Pembangunan Kawasan agrowisata tersebut, Oleh karena itu di dalam suatu organisasi perlu sekali adanya pembagian kerja yang baik yang dapat memberikan penjelasan bagi para anggota untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, untuk melihat pembagian kerja dalam pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH, maka peneliti menurunkan konsep tersebut dengan indikator sebagai berikut;

5.1.3.1 Perincian Tugas

Dalam sebuah organisasi, dibutuhkan perincian tugas di masing-masing instansi yang terlibat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan tidak adanya peran ganda dalam organisasi tersebut. Sebagai salah satu lembaga lintas sektoral, perincian tugas merupakan salah satu hal yang

[74] Loc.cit Sandy Risdyandy.

penting. Sebab, dengan adanya perincian tugas tersebut, anggota Satgas mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, lebih spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses tercapainya tujuan.

Dalam Pembangunan Kawasan Agrowisata dibutuhkan peranan masing-masing instansi yang terlibat dalam Satgas yang telah dibentuk. Adapun, perincian tugas masing-masing anggota satgas disesuaikan dengan tupoksi masing-masing anggota berdasarkan dari SKPD mana anggota Satgas tersebut berada. Perincian tugas merupakan salah satu faktor yang paling penting karena adanya perincian tugas akan dapat memberikan kejelasan bagi para anggota satgas untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab mereka. Dalam hal ini pembangunan kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH di Lubuk Minturun masing-masing anggota satgas melakukan tugas terkait dengan pembangunan yang telah direncanakan berdasarkan tupoksi mereka masing-masing berdasarkan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur yang dibuat. Hal ini dikemukakan oleh Kabag. Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura Ibu Iriana Dewi Yeni sebagai berikut;

> "...DPTPH dalam pembangunan Kawasan agrowisata ini, sebagai Leading Sektor, disini kita bertugas menyampaikan informasi kepada SKPD lain yang telah dibentuk Satgas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, maksud dari pembentukan Satgas adalah untuk Melaksanakan pembangunan Infrastruktur di UPTD BBI TPPH..." (wawancara dengan kabag. Perencanaan DPTP Prov Sumbar pada 10 april 2018 pukul 08.20-09.15 wib).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bagaimana perincian tugas yang telah ditetapkan masing-masing bagi pihak yang terlibat, hal ini sebagai bentuk upaya dalam pelaksanaan agar tidak terjadi ketimpangan dalam

melaksanakan tugas masing-masing, hal ini juga disampaikan oleh Bapak Didit dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatra Barat;

> "...Dalam kegiatan ini Dinas Pariwisata hanya membantu sesuai konteksnya saja. Sama dengan dinas-dinas lainnya. Kita hanya memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan di kawasan tersebut..." (wawancara dengan kabid pengembangan dan pemasaran dinas pariwisata sumbar pada 12 juni 2018 pada 09.00-09.55 wib).

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bagaimana perincian tugas yang dilaksanakan dalam kegiatan ini yaitu sesuai apa yang dibutuhkan saja, tidak semua dinas yang tergabung dalam pembentukan satgas bekerja secara koordinatif. Berdasarkan Perincian tugas yang telah ditetapkan dari masing-masing satgas tersebut, terlihat bagaimana telah direncakan infrastruktur yang akan dibangun dikawasan BBI Lubuk Minturun, hal ini sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan kawasan Agrowisata. hal ini disampaikan oleh Ibu Ir. Elviana Anwar, Msi Kepala UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun;

> "...Perencanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditentukan oleh SKPD terkait adalah sebagai penunjang dan daya tarik bagi kawasan BBI sendiri, setiap dinas melaksanakan kegiatannya masing-masing..." (wawancara dengan Ka. UPTD BBI pada 20 Juli 2018 Pukul 10.08.11.09 Wib).

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bagaimana pihak terkait melaksanakan tugas berdasarkan fungsinya masing-masing, hal ini sesuai dengan indikator perincian tugas, yang mana keberhasilan Koordinasi adalah berdasarkan pembagian kerja yang baik dan sesuai dengan perincian tugas yang telah ditetapkan. Adapun dalam pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD

BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang pada tahun 2014 beberapa SKPD yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah mulai melaksanakan pembangunannya pada tahun 2015.

Adapun hal ini bertujuan dimana Sektor ekonomi pariwisata sudah menjadi andalan bagi daerah-daerah yang sedang tumbuh perekonomiannya dalam menopang kegiatan ekonomi lainnya yang menjadi basis untuk melakukan pembangunan ekonomi selama ini. Besarnya potensi daya tarik wisata yang terlihat dari potensi alamiah, budaya, lingkungan, ditambah dengan tingginya keinginan turis mancanegara untuk datang berkunjung merupakan suatu peluang dalam mengembangkan sektor ekonomi pariwisata menuju kepada industri pariwisata di Sumatera Barat. Adapun pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015 akan peneliti bahas dari masing-masing dinas yang tergabung dalam satgas penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, adapun sebagai berikut;

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat merupakan leading sektor dalam pelakasanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di BBI TPPH Lubuk Minturun, yang mana kegiatan ini dilaksanakan secara kordinatif dengan instansi-instansi lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ir. Djoni selaku Kepala Dinas DPTP;

> "...DPTP merupakan penggagas dari pembangunan ini, kegiatan ini pada awalnya bertujuan untuk edukasi pertanian dan pemanfaatan lahan, untuk itu kita berkoordinasi dan mengajak dinas-dinas lainnya yang ingin turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Melihat dari antusias dari dinas-dinas lain maka kita melaporkan kegiatan ini ke BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat untuk memfasilitasi kami dan mewadahi pembangunan

> tersebut...” (wawancara dengan Kadis. DPTP Tahun 2015 pada 16 Juni 2018 pukul 14.45-15.19 Wib).

Berdasarkan kutipan wawancara yang di paparkan oleh Bapak Ir. Djoni tersebut dapat dilihat bahwasanya pembangunan ini dilakukan secara bersama dengan dinas lainnya yang tergabung dalam kegiatan pembangunan tersebut, pernyataan dari Bapak Joni tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ir. Andi Ikhvan, ME selaku Kabid. Irigasi dan Rawa dari Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat;

> “...Pada waktu itu kami ada event Hari Pangan Nasional di TVRI, disana ada beberapa dinas yang hadir dalam acara tersebut, lalu pak Joni dari dinas DPTP mengusulkan satu kegiatan wisata yang berbasis agro, kebetulan dari DPTP sendiri sudah memiliki lahan, dari rencana tersebut barulah dimulai tahap persiapan dan setelah itu melaporkan rencana pembangunan tersebut ke BAPPEDA...”(wawancara dengan Kabid. Irigasi dan Rawa Dinas PSDA pada 25 Mei 2018 pukul 09.12-10.09 Wib).

Dari pernyataan wawancara yang di paparkan oleh bapak Ir. Andi Ikhvan dibenarkan oleh Ibuk Ir. Gusti Rufita, MP selaku Kasubid. Ekonomi dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat;

> “...kita menerima laporan dari Dinas DPTP bahwasanya akan ada rencana pembangunan agrowisata di Lubuk Minturun, disini kita diminta untuk memfasilitasi dan mewadahi rencana pembangunan tersebut, setelah kami pertimbangkan kita dari BAPPEDA bersedia menjadi fasilitator dalam pembangunan ini...”(wawancara dengan Kasubid Ekonomi BAPPEDA pada 23 Juli 2018 Pukul 13.45-14.55 Wib).

Dari paparan wawancara diatas dapat dilihat bagaimana proses perencanaan sebelum terjadinya pembangunan infrastruktur pada kawasan agrowisata BBI TPP, terlihat bagaimana beberapa dinas menyetujui usulan dari bapak Ir. Djoni dari dinas DPTP, selaku leading sektor Dinas DPTP sendiri

menjalankan tugasnya dalam pembangunan ini yaitu membuat pembangunan Gudang Alsintan dan Gudang Pembangunan Pupuk yang dapat dilihat pada gambar 5.13 :

Gambar 5.13
Maket Perencanaan Pembangunan Gudang Alsintan

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2015.

Berdasarkan Gambar 5.13 Pembangunan Gudang Alsintan diatas, dapat dilihat bagaimana DPTP merencanakan pembangunan Gudang Alsintan yaitu bertujuan untuk menyimpan hasil pertanian yang berada pada kawasan Agrowisata tersebut, gudang penyimpanan tersebut dimanfaatkan sebagai bentuk memperlihatkan hasil pertanian kepada masyarakat sekitar dan sebagai bentuk edukasi. Adapun anggaran dalam pembangunan Gudang tersebut berasal dari APBD yaitu sebesar Rp 559.535.000,00. Adapun perencanaan pembangunan lainnya yang akan dilaksanakan oleh DPTP yaitu Pembangunan Gudang Pupuk, dapat dilihat pada Gambar 5.13 :

Gambar 5.14
Maket Perencanaan Pembangunan Gudang Pupuk

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2015.

Berdasarkan Gambar 5.14, tujuan dari perencanaan pembangunan gudang pupuk tersebut yang dilaksanakan DPTP Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam pemilihan pupuk yang baik untuk hasil pertanian yang lebih baik, adapun anggaran perencanaan pembangunan terbut berasal dari APBD yang berjumlah sebesar Rp 184.152.000,00. Berdasarkan paparan wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti jelaskan, hal ini juga dibuktikan dari pernyataan Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Provinsi Sumatera Barat, Ibu Ir. Rini Historina;

> "...Perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH yang diusulkan oleh Bapak Joni adalah sebagai upaya dalam pemanfaatan lahan, hal ini berguna untuk masyarakat Sumbar dan khususnya untuk masyarakat Lubuk Minturun sendiri, DPTP sendiri merencanakan pembuatan Gudang Alsintan dan Gudang Pupuk, ini sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat, kita sebagai pengelola juga mengawasi kegiatan ini sebaik mungkin..." (wawancara dengan Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan UPTD BBI TPPH Pada 9 Mei 2018 Pukul 14.00-15.16 Wib).

Berdasarkan pernyataan wawancara peneliti dengan Kasi pengembangan dan pemeliharaan UPTD BBI TPPH dapat disimpulkan, Dalam hal ini apabila agrowisata dikelola secara professional, agrowisata dapat memberikan manfaat cukup luas terhadap peningkatan konservasi lingkungan, peningkatan nilai estetika dan keindahan alam dan memberikan nilai rekreasi, peningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang pada gilirannya kegiatan agrowisata dapat mengembangkan ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar wilayah destinasi wisata. Dalam perencanaan tersebut, pelaksanaan dari pembangunan tersebut perlu adanya dukungan dari SKPD terkait yang telah dibentuk satgas berdasarkan SK Gubernur. Adapun pelaksanaan dari pembangunannya Koordinasi antar satgas harus saling bersinergi agar tujuan dari pelaksanaan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

b. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 430-78-2015, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat merupakan anggota Satgas yang tergabung dalam penyiapan Pembangunan Infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, adapun tugas dan fungsinya disampaikan oleh Bapak Drs.Didit P. Santoso, M.Si selaku Kabid.Pemasaran Dinas Pariwisata Sumatera Barat;

> "...Dinas Pariwisata sendiri dalam kegiatan ini juga ikut berpartisipasi, kami juga ikut tergabung dalam satgas meskipun kegiatan ini sebenarnya lebih menonjolkan pertaniannya, dan juga harapan dari pihak-pihak terkait Dinas Pariwisata ikut memfasilitasi pembangunan ini, jadi kita melakukan tugas berdasarkan perintah dari DPTP saja, apa yang mereka butuhkan ya kami lakukan..."(wawancara dengan Kabid.Pemasaran Dinas Pariwisata Sumatera Barat pada 18 juni 2018 pukul 09.00-10.15 Wib).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Didit P. Santoso, dapat dilihat bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ikut tergabung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH, sebagaimana yang telah dijelaskan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dinas ini hanya menjalankan perintah dari DPTP, hal ini dibenarkan oleh Bapak Ir. Djoni Selaku Kepala Dinas DPTP;

> "...dalam perencanaan pembangunan kawasan BBI ini dinas Pariwisata juga ikut berpartisipasi dan juga menjadi bagian dari satgas, tugas dari dinas pariwisata sendiri waktu itu membuat spanduk tentang kawasan agrowisata di BBI Lubuk Minturun..."(Wawancara dengan Kadis. DPTP tahun 2015 pada 20 Mei 2018 Pukul 10.39-11.12 Wib).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ir. Joni, bahwasannya Dinas Pariwisata ikut berkontribusi dalam pembangunan tersebut dapat dilihat Koordinasi antara DPTP dan Dinas Pariwisata dapat dikatakan cukup efektif dimana dalam hal ini dengan pembuatan spanduk/ baliho yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata adalah sebagai bentuk penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat luas agar mengetahui adanya Kawasan agrowisata di UPTD BBI Lubuk Minturun. Berdasarkan paparan wawancara tersebut, Hal ini juga diperkuat dengan wawancara peneliti dengan masyarakat penjual tanaman hias di kawasan agrowisata Lubuk Minturun, yaitu Bapak Abas;

> "...Sejak adanya kawasan agrowisata di BBI, banyak orang-orang yang berdatangan, dan Lubuk minturun sendiri sudah menjadi objek wisata, tidak hanya Kolam ABG saja, tapi wisata yang berkaitan dengan alam dan pertanian..."(wawancara dengan masyarakat penjual tanaman hias di kawasan agrowisata Lubuk Minturun pada 20 Agustus 2018 pukul 15.34-16.16 Wib).

Berdasarkan paparan wawancara yang telah peneliti paparkan diatas, dapat dilihat bagaimana koordinasi antara Dinas-dinas terkait menciptakan satu tindakan yang terintegrasi untuk mencapai visi-misi yang telah direncanakan, sehingga suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. hal ini juga terlihat dari paparan wawancara peneliti dengan masyarakat, salah satunya dengan Bapak Rizal sebagai masyarakat sekitar kawasan agrowisata di Lubuk Minturun;

> "...Banyak manfaat yang kami terima setelah adanya kawasan agrowisata ini, desa menjadi ramai karena banyak juga orang-orang luar datang sekedar menengok ataupun berwisata kesini. Sangat membantu kami dalam sudut ekonomi dan dikenal khalayak luar..."(wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan agrowisata di Lubuk Minturun pada 20 Agustus 2018 pukul 16.30-17.15 Wib).

Berdasarkan paparan wawancara masyarakat ini juga dapat dilihat bagaimana kegiatan pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sehingga nantinya dapat berguna dan menjadi ladang perekonomian bagi masyarakatnya.

c. Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat

Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat ikut berpartisipasi dalam Penyiapan pembangunan kawasan infrastruktur Agrowisata di UPTD BBI TPPH, dalam perencanaannya Dinas Prasjaltarkim sendiri membuat bangunan menara pantau, zona parkir, lampu jalan dan menara bundo kanduang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dokumentasi yang peneliti jelaskan dibawah ini:

Gambar 5.15
Maket Perencanaan Menara Pantau di UPTD BBI TPPH

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.15, dapat dijelaskan dalam perencanaannya Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat akan membuat menara pantau di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, yang bertujuan untuk memantau seluruh aktifitas dari pengunjung maupun wisatawan, yang mana anggaran dalam pembangunannya bersumber dari APBD, dan untuk perencanaan lainnya, Dinas Prasjaltarkim sendiri juga akan membangun zona parkir, hal ini terlihat dari dokumentasi Gambar 5.16 :

Gambar 5.16

Maket Perencanaan Zona Parkir Pada Kawasan Agrowisata

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.16 dapat dilihat bagaimana kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, dalam perencanaannya pada tahun 2014 juga dibangun infrastruktur Zona parkir, dalam pembangunan ini yang bertugas dalam pelaksanaan tersebut adalah Dinas Prasjaltarkim, berdasarkan perencanaan pembangunannya, sumber anggarannya berasal dari APBD. Selain pembangunan zona parkir, Dinas Prasjaltarkim juga akan membangun tugu Bundo Kanduang, hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.17 :

Gambar 5.17

Maket Perencanaan Tugu Bundo Kanduang

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2014.

Berdasarkan data dokumentasi Gambar 5.17 dapat dilihat perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat adalah membangun tugu Bundo Kanduang, hal ini bertujuan sebagai identitas dari masyarakat Minangkabau.

Dari hasil data dokumentasi gambar yang telah peneliti paparkan diatas bahwasanya dalam perencanaan penyiapan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat, dimana dalam hal ini Rincian tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat yaitu

membuat Infrastruktur pendukung bagi kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH. Adapun perencanaannya dilaksanakan pada tahun 2014. Hal ini dimaksudkan agar kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun sendiri bisa lebih memaksimalkan sebagai kawasan wisata yang berbasis Agro.

d. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat

Pada Tahun 2014 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat Juga berpartisipasi dalam penyiapan perencanaan pembangunan kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH di Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat bagaimana perincian tugas yang dibuat oleh Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat sendiri untuk mendukung sarana dan prasarana kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, adapun perencanaan pembangunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sendiri yaitu dapat dilihat pada gambar 5.18 :

Gambar 5.18

Maket Perencanaan Rehabilitasi Kolam Aquaponik

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Tahun 2014.

Dapat dilihat dari Gambar 5.18 bahwasanya perencanaan penyiapan infrastruktur yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu merehabilitasi kolam Aquaponik, dapat dilihat bagaimana kondisi Kolam aquaponik pada tahun 2015 berdasarkan Gambar 5.19 :

Gambar 5.19

Perencanaan Rehabilitasi Kolam Aquaponik

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2015.

Berdasarkan Gambar 5.19 tersebut dapat dijelaskan bahwasanya kolam tersebut dalam perencanaannya akan di rehabilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang bertujuan untuk memperindah ataupun menujang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH, sesuai dengan perencanaannya kolam aquaponik tersebut akan di rehabilitasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam masterplan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Selain merehabilitasi kolam Aquaponik, tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga membangun Kolam Hias Pada Infrastruktur UPTD BBI TPPH, dapat dilihat pada gambar 5.20:

Gambar 5.20

Perencanaan Rehabilitasi Kolam Hias di Bangunan UPTD BBI TPPH

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.20 dapat dijelaskan bahwa tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sendiri yaitu membangun infrastruktur Kolam Hias Pada bangunan UPTD BBI TPPH, hal ini bertujuan sebagai penunjang daya tarik untuk wisatawan. Selain kolam hias, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat juga merencanakan pembangunan kolam pemancingan, hal dapat dilihat pada Gambar 5.21 :

Gambar 5.21

Maket Perencanaan Kolam Pemancingan

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.21 dapat dilihat perencanaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH maka dibangunlah kolam pemancingan, hal ini bertujuan sebagai penambah daya tarik wisatawan, tidak hanya menonjolkan hasil pertanian saja, tapi juga menonjolkan wisata pemancingan.

Berdasarkan Rincian tugas dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat dalam Menunjang kawasan agrowisata, perencanaan yang telah disiapkan pada tahun 2014, adalah sebagai bentuk kesiapan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat. Dimana dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dikatakan sudah berjalan pada tahun 2015. Hal ini juga terlihat dari perencanaan yang telah ditentukan, dimana setiap anggota yang tergabung dalam satgas penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH, dapat dinyatakan telah berjalan dan cukup efektif jika dilihat dari bentuk Koordinasi antar satgas.

e. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan merupakan bagian dari Satuan Tugas, dimana dalam rincian tugas yang telah ditentukan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH di Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merencanakan pembangunan Infrastruktur yang dapat dilihat pada gambar 5.22 :

Gambar 5.22

Maket Perencanaan Pembuatan Kawasan Arboretum

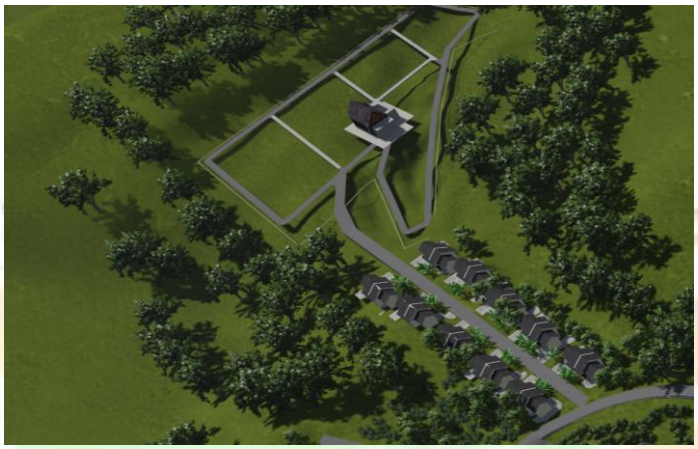

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.22, dimana dalam menunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merencanakan pembangunan kawasan arboretum, yang bertujuan sebagai pemikat maupun daya tarik sendiri bagi wisatawan maupun masyarakat sekitar, hal ini terlihat bagaimana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki kontribusi yang cukup efektif pada kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Selain pembuatan Kawasan Arboretum, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga merencanakan pembangunan lainnya sebagai penunjang, kawasan agrowisata, hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.23 :

Gambar 5.23

Maket Perencanaan Kios Penjualan Jamur dan Madu

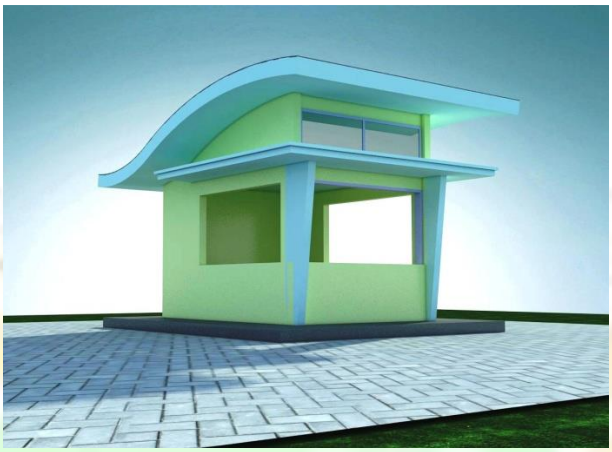

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.23 dapat dijelaskan bahwasanya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, juga menerapkan budidaya jamur dan madu, untuk penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH dalam perencanaannya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat membuat kios penjualan jamur dan madu sebagai wadah untuk penjualan hasil dari budidaya jamur dan madu. Dalam hal ini dapat dikatakan, sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan untuk memberikan daya tarik bagi wisatawan, selain tempat wisata juga sebagai tempat penjualan hasil budidaya jamur dan madu lokal Sumatera Barat.

f. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat juga merupakan bagian dari Satuan Tugas penyiapan perencanaan pembangunan kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, adapun rincian tugas yang direncanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, dapat dilihat pada Gambar 5.24 :

Gambar 5.24

Maket Perencanaan Pembuatan Gazebo

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.24 dapat dilihat perencanaan pembangunan yang akan dibuat oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, yang mana tujuan pembuatan gazebo ini adalah sebagai tempat penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH, dimana hal ini Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sendiri merencanakan pembuatan kafe hasil olahan dari Sapi Perah maupun kios untuk pakan ternak, hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.25 :

Gambar 5.25

Maket Perencanaan Pembuatan Cafe Olahan dan Kios Pakan Ternak

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.25 dapat dijelaskan bagaimana Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat memiliki rincian tugas dalam pembangunan kawasan agrowisata tersebut yaitu membuat cafe hasil olahan dari susu sapi perah maupun kios penjualan pakan ternak. Hal ini bertujuan agar wisatawan yang berkunjung dapat menikmati hasil dari peternakan maupun untuk masyarakat juga dapat membeli pakan ternak dikawasan agrowisata tersebut, hal ini juga sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

g. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumatera Barat

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari satuan tugas berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dalam rincian tugasnya BKP sendiri memfasilitasi sarana maupun prasarana sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, adapun perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 5.26 :

Gambar 5.26

Maket Perencanaan Pembuatan Rumah Pangan Lestari

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2014.

Berdasarkan data dokumentasi Gambar 5.26, dapat dijelaskan bahwasannya sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat merencanakan pembangunan rumah pangan lestari, hal ini sebagai pemicu daya tarik wisatawan terhadap kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, selain itu guna Rumah Pangan Lestari tersebut adalah sebagai bentuk kawasan agrowisata tersebut juga sebagai tempat rekreasi baik untuk keluarga maupun sebagai pusat pendidikan. Selain itu BKP juga merencanakan pembangunan outlet penjualan sayuran, hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.27 :

Gambar 5.27

Maket Perencanaan Outlet Penjualan Sayuran

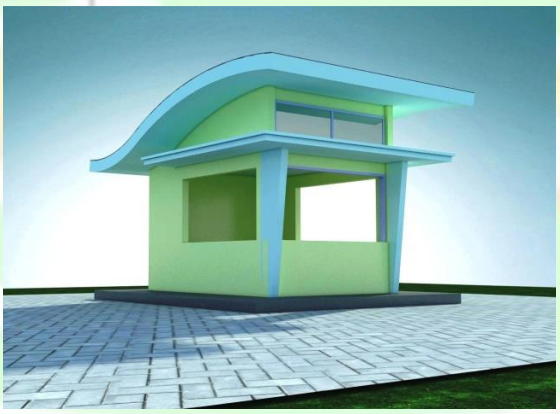

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH. Tahun 2014.

Dari dokumentasi Gambar 5.27 dapat dijelaskan bahwasannya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan rincian tugasnya yaitu membuat outlet penjualan sayuran, yang mana tujuannya selain sebagai tempat wisata yang berbasis agro, wisatawan juga dapat menikmati hasil dari pertanian maupun perkebunan di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, hal ini juga tujuannya sebagai penunjang maupun daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, merupakan bagian dari anggota Satuan Tugas yang telah ditunjuk berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat, dimana dalam Rincian tugasnya Dinas PSDA juga membangun infrastruktur dalam menunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, yaitu membangun dan memperbaiki saluran irigasi serta membuat kolam bertingkat, hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.28 :

Gambar 5.28

Maket Perencanaan Pembangunan Kolam Bertingkat

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 5.28, pembangunan kolam bertingkat yang dibuat oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai penunjang Infrastruktur kawasan agrowisata pada UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun, dimana dalam hal ini wisatawan yang berkunjung dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada pada kawasan agrowisata tersebut.

i. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam rincian tugasnya guna untuk menunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun juga membangun café hasil dari perkebunan, hal ini terlihat pada Gambar 5.29 :

Gambar 5.29

Maket Perencanaan Pembuatan Cafe Produksi Perkebunan

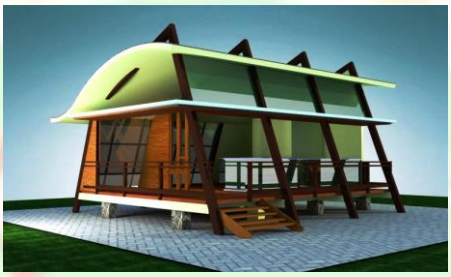

Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Tahun 2014.

Berdasarkan data dokumentasi Gambar 5.29 dapat dilihat bagaimana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam rincian tugasnya guna untuk menunjang kebutuhan kawasan agrowisata UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yaitu membangun sebuah kafe produksi perkebunan, yang mana kafe tersebut akan dimanfaatkan oleh wisatatawan yang berkunjung dan menikmati hasil dari perkebunan yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, adapun dalam perencanaannya hasil perkebunan yang akan dimanfaatkan di kafe tersebut yaitu seperti Kopi dan coklat.

Dari paparan data dokumentasi yang telah peneliti jelaskan diatas, bahwasanya dalam variabel pembagian kerja dan diturunkan melalui indikator Perincian tugas dapat dilihat dari tugas-tugas yang direncanakan oleh Dinas-dinas yang tergabung dalam Satuan Tugas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Provinsi Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk Lubuk Minturun Tahun 2015. Yang berbunyi bahwa dalam rangka penyiapan kawasan agrowisata Balai Benih Induk (BBI) Lubuk Minturun sebagai salah satu destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat, yaitu perlu menyusun langkah-langkah secara terpadu dari berbagai sektor sehingga akselerasi perwujudan kawasan Balai Benih Induk (BBI) Lubuk Minturun dapat segera direalisasikan.

Dalam hal ini peneliti menilai berdasarkan indikator Perincian tugas dapat dijelaskan bahwasanya dinas-dinas yang tergabung dalam satgas tersebut pada tahun 2014 telah memiliki perencanaan pembangunan sendiri dan anggaran-anggarannya langsung di tahun itu, untuk menunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Kota Padang Sumatera Barat setiap satgas bertanggung jawab dalam memfasilitasi kawasan agrowisata. Perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut dalam pembagian dan perincian tiap masing-masing SKPD itu sudah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan kawasan. Adapun perencanaan pembangunan yang telah peneliti paparkan tersebut sudah terlaksana pada tahun 2015. Dimana setiap SKPD yang tergabung dalam satgas menyelesaikan bagian-bagiannya dengan melakukan tender, yang mana pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan agrowisata tersebut pada tahun 2018 masih berjalan dan juga masih dalam tahap pembangunan.

Dalam indikator Perincian tugas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan pembangunan dalam menunjang kawasan agrowisata di UPT BBI TPPH Lubuk Minturun dapat dikatakan cukup efektif, hal ini terlihat dari Dinas-

dinas yang tergabung dalam Satgas tersebut mengambil perannya masing-masing dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Yang mana Perincian Tugas merupakan salah satu hal yang penting. karena dengan adanya perincian tugas tersebut, anggota Satgas mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, lebih spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses tercapainya tujuan.

Menurut Hasibuan dalam Sandy Risdyandy[75], Pembagian Kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Pada penelitian ini, peneliti menurunkan konsep tersebut berdasarkan indikator Perincian Tugas, yang mana dalam organisasi dibutuhkan perincian tugas pada masing-masing unit yang terpisah.

Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih pekerjaan dan tidak ada peran ganda dalam organisasi tersebut. Disini Peneliti melihat perincian tugas dari masing-masing instansi yang terlibat di satuan tugas dalam pembangunan infrastruktur agrowisata BBI TPPH Lumin sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti melihat adanya pembagian kerja yang dilakukan oleh setiap instansi yang tergabung dalam satuan tugas terkait pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata, hal ini terlihat dari perincian tugas pada masing-masing instansi yang terlibat sudah jelas dan sudah ada perencanaannya masing-masing untuk

[75] Sandy Risdyandy. Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS(KPA) dengan Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda, e-jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman,2014.

menunjang pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan/ target tujuan dari berbagai unit kerja suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian yang ada akan bekerja menuju arah yang berlainan dengan irama / kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula tanpa koordinasi, masing-masing dengan mengorbankan kepentigan organisasi secara keseluruhan.[76] Sedangkan Hasibuan berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan untuk mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.[77] Dalam penelitian tentang Koordinasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang ini peneliti memakai desain penelitian Teori Koordinasi dari Malayu Hasibuan yang dikutip dalam Sandy Risdyandy.

. Selain variabel Kesatuan tindakan yang membuat suatu keberhasilan pada kordinasi yaitu dengan adanya Komunikasi yang baik antara pimpinan terhadap bawahan, dalam penelitian ini peneliti juga mengukur keberhasilan koordinasi melalui variabel komunikasi.

[76] Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 95.

[77] Malayu Hasibuan, Manajemen Dasar, pengertian, dan masalah, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011.

Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain.[78] Sejalan dengan Hani Handoko, konsep komunikasi menurut Hasibuan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap atau perilaku orang lain melalui informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang disampaikannya kepada orang tersebut. Begitu juga menurut Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa dalam suatu organisasi menyelenggarakan komunikasi terus-menerus merupakan suatu keharusan. Dikatakan demikian karena dengan komunikasi berbagai hal yang menyangkut organisasi disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya.

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan dilapangan dan dianalisis berdasarkan sumber-sumber yang terkait dalam penelitian ini, dan berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dan dikaitkan melalu teori Koordinasi Malayu Hasibuan yang diturunkan berdasarkan variabel-variabel serta indikator-indikator tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang dapat dikatakan telah berjalan dengan baik sepanjang pelaksanaannya pada tahun 2015.

Hal ini dapat dilihat dari tujuan penelitian ini sendiri yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan yaitu Kesatuan Tindakan, Komunikasi dan

[78] T Hani Handoko,Manajemen edisi 2, BPFE, Yogyakarta,1999, hlm .272

Pembagian Kerja antar Satuan Tugas yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat yang mana pihak SKPD terkait, telah memiliki peran masing-masing dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun.

Berdasarkan Variabel Komunikasi dan Pembagian Kerja masih kurang efektif dan informasi yang terjalin masih simpang siur, akan tetapi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya dapat diatasi, dalam pembangunan infrastrukturnya sudah berjalan dan bisa dimanfaatkan, hal ini telah dibuktikan dengan adanya data dokumentasi maupun wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap sumber-sumber yang terkait dalam penelitian ini.

Jadi, dalam penelitian ini berdasarkan temuan peneliti dilapangan dalam upaya mewujudkan Agrowisata di perkotaan menjadi sangat khas, yang mana pendapat masyarakat tentang pertanian selalu dikaitkan dengan pedesaan. Dalam hal ini dibentuknya Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH merupakan sebagai bentuk transformasi dari sektor pertanian dan berhubungan langsung dengan sektor wisata yang berbasis agro. Untuk itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat mengusulkan pengembangan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang yang dicetus atau dikepalai oleh Bapak Ir. Djoni yang waktu itu menjabat selaku Kadis. DPTP Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini alasan DPTP sebagai Leading Sektor dari penyiapan pembangunan Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPP Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, yaitu:

1. Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat.

2. UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat merupakan pelaksana teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.
3. Pencetus ide tentang pembangunan kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat Merupakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.
4. Agrowisata itu sendiri merupakan wisata yang berbasis pertanian.

Dalam menunjang pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan juga berkoordinasi dengan dinas lainnya yang dibentuk Satuan Tugas (Satgas) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk Lubuk Minturun Tahun 2015, adapun Tugas dan Fungsi Satgas itu sendiri yaitu sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat.

Setelah itu anggota Satgas yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur tersebut merencanakan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat.adapun Dinas-dinas yang tergabung dalam Satgas tersebut yaitu; pada tahun 2013 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perkanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan ditahun 2014 beberapa dinas juga ikut berpartisipasi yaitu Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat, Dinas

PSDA Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat. Adapun Dinas-Dinas tersebut memiliki perencanaan pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasaran sendiri untuk memfasilitasi kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, yang mana anggaran berasal dari APBD, APBN, dan juga di tenderkan kepada pihak ketiga.

Adapun Koordinasi yang terbentuk dalam pembangunan tersebut yaitu terlihat pada pertemuan rapat yang dilakukan dan menentukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang diwakilkan oleh pihak SKPD terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) yang mana tujuan pembentukan satgas tersebut untuk mempermudah jalannya Koordinasi antar SKPD. Berdasarkan Temuan peneliti dilapangan dan berdasarkan variabel-variabel dan diturunkan melalui indikator-indikator yang peneliti gunakan melalui Teori Koordinasi Malayu Hasibuan yang mana Koordinasi yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur tesebut dinyatakan cukup efektif, karena pihak SKPD yang tergabung dalam pembentukan Satgas, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala.

Hal ini terlihat pada terselesaikannya Infrastruktur maupun fasilitas yang telah direncanakan sudah dapat dimanfaatkan walaupun tidak berjalan 100 persen namun pengerjaan ini tetap dilanjutkan oleh pihak UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat dengan kemampuan mereka sendiri sesuai dengan Keputusan Gubernur yang menjadikan UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat sebagai pengelola dan pemelihara Kawasan Agrowisata di Lubuk Minturun.